

# BAB II

## TAKTIK INTERVENSI

**S**aya termasuk orang yang beruntung, karena sempat terlibat secara langsung dalam sejumlah kampanye untuk mengintervensi pelanggaran HAM atas nama korban. Saya juga sempat mengobservasi begitu banyak kampanye HAM lainnya yang berhasil di seluruh dunia. Pada akhir 1980-an, saya membantu meluncurkan Rugmark, upaya pertama untuk mencegah penggunaan tenaga buruh anak dalam industri permadani yang diberikan label 'relawan'. Organisasi yang saya geluti, Bachpan Bachao Andolan (Koalisi Asia Selatan Anti Perbudakan Anak) atau South Asian Coalition on Child Servitude (SACCS), telah menyelamatkan dan merehabilitasi lebih dari 65.000 anak dari perbudakan dan mengangkat problem ini ke hadapan dunia melalui Demonstrasi Global Menentang Buruh Anak di tahun 1998.

Di seluruh dunia, kampanye konsumen lainnya, termasuk Konsumen Karpét, Pakaian Bersih dan kampanye Foul Ball, juga telah mengetuk hati jutaan konsumen untuk memakai kapasitasnya dalam menolong menghentikan pelanggaran. Pada saat yang sama, kampanye mobilisasi massal—untuk hak-hak buruh atas lingkungan yang bersih di Amerika Latin, sebagai contoh, serta untuk hak-hak kaum perempuan di Afrika—telah mendemonstrasikan perlawanan terhadap pelanggaran HAM yang tengah berlangsung dan mengacaukan kemampuan para pelaku untuk terus melanjutkannya.

Apa yang mirip dalam berbagai kampanye ini adalah bahwa mereka dimulai dari tingkat akar rumput. Sementara jumlah dan batas dari hukum dan regulasi meningkat, masyarakat hidup dalam kondisi yang sama atau bahkan lebih buruk dibanding sebelumnya, di bawah tolok ukur HAM.

Sesungguhnya, kita tidak dapat menghayati hak asasi manusia hanya melalui hukum. Orang-orang di lapangan membutuhkan berbagai intervensi ketika hak-haknya dilanggar atau ketika pelanggaran ini masih tengah berjalan.

Di dalam Bab ini Anda akan menyimak berbagai individu dan organisasi yang telah bekerja menghentikan pelanggaran HAM yang tengah terjadi melalui kampanye-kampanye seperti ini maupun taktik-taktik inovatif lainnya. Saya harap bahwa Anda, seperti juga halnya saya, akan terinspirasi untuk terus melanjutkan pembelaan atas pelanggaran hak asasi manusia.

### ***Kailash Satyarthi***

*Ketua, Global March Against Child Labour*

*South Asian Coalition on Child Servitude—SACCS (Koalisi Asia Selatan Anti Perbudakan Anak)*

*Global Campaign for Education—GCE (Kampanye Global untuk Pendidikan)*

*New Delhi, India*

Taktik-taktik di dalam Bab ini telah digunakan untuk melancarkan intervensi atas situasi-situasi pelanggaran HAM yang tengah berlangsung dan penyangkalan keras oleh pihak pelaku. Oleh karena itulah, gugus taktik ini termasuk di antara taktik yang paling menantang dan paling menginspirasi. Para pembela HAM di sini beroperasi dalam situasi-situasi kritis. Mereka memerangi praktik-praktik kuasa yang telah begitu mengurat-akar, mencoba menjungkirbalikkan *status quo*. Mereka menantang kepercayaan maupun tradisi yang telah diterima begitu saja selama ini dan melawan praktik-praktik korupsi dan pelanggaran yang telah dianggap sebagai norma kultural.

Acap kali mereka beroperasi dari dasar struktur kuasa dan memobilisir sumber daya luar biasa untuk melakukan hal itu. Bisakah dibayangkan bagaimana para pekerja seks profesional bisa diajak bergabung untuk bersama-sama menyelamatkan gadis-gadis muda dari paksaan menjalani profesi seperti mereka? Para pekerja anak juga telah membentuk serikat untuk melindungi hak mereka. Petani-petani tanpa lahan telah mulai mengelola tanah-tanah terlantar. Pemerintah lokal telah berbicara keras melawan hukum dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah federal.

Akan tetapi anda juga dapat menemukan di sini, beberapa contoh bisnis yang luar biasa dan patut dipuji—walau berada nyaman di struktur kekuasaan—menggunakan kuasa dan pengaruh mereka sendiri untuk mengintervensi situasi-situasi pelanggaran yang tengah berlangsung.

Dalam banyak dari taktik ini para praktisi HAM mengambil alat-alat dari mereka yang tengah menjalankan praktik-praktik kuasa dan memukulnya balik, untuk memerangi penyalahgunaan kekuasaan. Mereka mempelajari skema anggaran dan hukum, juga secara publik mempertanyakan pemerintah atas janji-janji mereka. Pada gilirannya mereka cukup kreatif untuk memanfaatkan daya kultur tradisional dan pemimpin-pemimpin yang dihormati untuk mengusung komunitas beranjak ke standar perlindungan hak asasi yang lebih memadai.

Taktik-taktik dalam Bab ini terbagi ke dalam empat kelompok:

1. Taktik resistensi (perlawanan) mendemonstrasikan perlawanan terhadap pelanggaran.
2. Taktik disrupsi (pengacauan) menggunakan tindakan langsung untuk mempengaruhi pelaku agar mengakhiri pelanggaran.
3. Taktik persuasi menggunakan para pimpinan masyarakat yang dihormati atau mekanisme-mekanisme institusional nonkonfrontasional untuk menegosiasikan berakhirnya pelanggaran.
4. Taktik Insentif menyediakan alternatif bagi pelanggaran hak asasi manusia.

## Taktik Perlawanan (Resistensi)

Taktik perlawanan mendemonstrasikan perlawanan terhadap pelanggaran atau penyangkalan terhadap hak asasi yang tengah berjalan. Taktik ini mengabdikan pada dua fungsi penting: membuat pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat dilihat—apakah bersifat lokal, nasional atau internasional—bagi mereka yang dipengaruhinya, kepada mereka yang memiliki kemungkinan untuk mengubahnya dan bahkan bagi mereka yang melakukannya. Mereka juga menyusun prakondisi bagi taktik lanjutan yang dapat mempengaruhi perubahan.

Taktik-taktik ini bisa terkesan amat sederhana. Sebuah taktik di Turki hanya menuntut jentikan pada sebuah tombol—namun, pada gilirannya, menggelombang menjadi jutaan tombol! Sementara taktik lainnya di Estonia dimulai sebagai sebuah pertemuan harian biasa saja. Mereka juga melibatkan penggunaan mekanisme-mekanisme yang cukup kompleks dan canggih seperti skema anggaran dan hukum terkait, maupun mekanisme lainnya yang belum dieksplorasi secara menyeluruh di waktu-waktu sebelumnya.

**Pencetan pada Sebuah Tombol:** Menciptakan ungkapan sebuah protes massal dengan aktivitas sederhana yang dapat diselesaikan secara aman oleh warga di rumah mereka sendiri

Di Turki, partisipasi dari sejumlah besar orang dalam kampanye tidak hanya menyediakan tindakan keamanan, tetapi mendorong lebih dan lebih banyak lagi orang—jutaan, pada akhirnya—untuk menjadi terlibat.

Kampanye Mematikan Lampu memobilisasi 30 juta orang di Turki untuk mengklik lampu rumah mereka—*on* dan *off*—sebagai sebuah wujud demonstrasi publik melawan korupsi pemerintah. Korupsi sendiri telah menjadi rahasia umum, namun masyarakat merasa apatis dan tak berdaya untuk melawannya. Dengan banyaknya warga yang merasa takut untuk berpartisipasi dalam tindakan publik, organisasi HAM membutuhkan taktik yang memiliki resiko *redah* secara individual yang dapat mengatasi rasa terisolasi dan ketakutan. Kampanye ini mengajak warga untuk melakukan tindakan bersama yang amat sederhana dan tidak beresiko, yang dapat

dilakukan setiap orang; yakni dengan hanya mematikan lampu mereka pada saat yang bersamaan setiap malam, sebagai ekspresi kejengkelan mereka atas minimnya tindakan serius secara bersama-sama dalam melawan korupsi.

Kampanye itu pada mulanya dipahami sebagai tanggapan kepada sebuah skandal yang menyingkapkan koneksi meluas di antara pejabat-pejabat pemerintah dengan kejahatan terorganisir. Sebulan sebelum peristiwa itu, para organisator aksi melancarkan sebuah kampanye publik yang masif. Mereka membentuk aliansi dengan organisasi-organisasi akar rumput dan berbagai serikat buruh. Para organisator meminta mereka untuk berkirim fax berisis petisi dan informasi mengenai kampanye ini kepada jejaring anggota mereka—yang pada gilirannya—mengirimkan fax kepada teman, kerabat maupun dan kontak-kontak mereka. Mereka juga mendaftar kolumnis, bintang-bintang radio dan penyiar TV untuk menyampaikan pesan layanan masyarakat.

Kelompok pengorganisir pada mulanya mengusulkan agar penduduk mematikan lampu rumah mereka selama satu menit setiap malamnya. Para warga kemudian mulai mengedip-ngedipkan lampu mereka: nyala dan mati. Menjelang minggu kedua, berbagai komunitas yang ada mulai berimprovisasi dengan melancarkan aksi jalanan yang berbeda, termasuk membanting pot dan panci. Ketika kelompok organisator menghentikan aksi, kampanye ini sendiri telah berlangsung selama lebih dari satu bulan.

Walaupun beberapa pejabat yang terlibat dalam skandal tetap bercokol di parlemen, namun telah terjadi sejumlah besar perubahan politik dan hukum semenjak dimulainya kampanye tersebut, termasuk pemeriksaan terhadap sejumlah pebisnis, polisi, personil militer dan pemimpin mafia di depan sidang pengadilan; juga munculnya kampanye di kalangan parlemen sendiri untuk menentang korupsi dan pergantian sekian banyak politisi yang gagal menangani korupsi negara.

Baca lebih jauh mengenai hal ini dalam buku catatan taktis yang tersedia di situs <[www.newtactics.org](http://www.newtactics.org)>, di bawah *Tools for Action*.

Aksi yang dimintakan kepada masyarakat adalah luar biasa sederhana. Ini tidak menuntut persiapan yang terlalu rumit dan dengan sedikit komitmen, bisa mendorong partisipasi yang lebih luas. Dengan demikian, taktik ini secara konseptual dapat dengan mudah diadaptasikan pada situasi yang lain. Pada kenyataannya, taktik yang serupa juga telah digunakan dalam banyak situasi di seluruh dunia. Masyarakat di Zambia membunyikan klakson mobil mereka pada waktu tertentu

setiap Jumat untuk memprotes keputusan Presiden untuk mengubah Konstitusi agar terus berkuasa. Rakyat di Chile memprotes rezim Pinochet dengan cara membunyikan keras-keras klakson mobil mereka, membanting pot dan panci melalui jendela apartemen mereka dan berbaris di jalanan. Hal lazim yang harus diatasi pada permulaan tiap kampanye seperti ini adalah kebutuhan untuk menangkap dan mengangkat keprihatinan publik menjadi kentara bagi masyarakat yang lebih luas (yang semula dikuasai oleh rasa takut, terisolasi dan apatis).

Hakikat dari taktik ini adalah keunggulannya dalam mengangkat persoalan yang sebelumnya tidak terlihat menjadi amat jelas. Taktik ini harus dievaluasi berdasarkan kesanggupannya untuk merangsang solidaritas masyarakat dan membantu mendefinisikan-ulang ruang politik baru, di mana ternyata lebih banyak masyarakat yang sesungguhnya bersedia bertindak bersama untuk perubahan.

Tetapi, sementara taktik-taktik ini mungkin secara konseptual sederhana, keberhasilan mereka tidak mudah untuk ditiru. Para organisator tidak dapat mengulangi lagi taktik ini dengan skala yang sama berbulan-bulan kemudian, kendati banyaknya isu dan mekanisme yang serupa. Sekali tercapai, momentum dari taktik ini harus segera dipakai untuk mendorong kemajuan pergerakan.

*Kapan Anda bisa menggunakan taktik semacam ini?  
Adakah pelanggaran di negara Anda  
yang mungkin diketahui oleh masyarakat,  
tetapi karena rasa takut dan apatis,  
orang-orang tidak bersuara lantang menentanginya?*

**Revolusi Bernyanyi:** Menyatakan identitas kultural secara massal untuk mengungkapkan perlawanan terhadap rezim penindas

Di Estonia, pada tahun 1980-an, kelompok-kelompok penentang rezim Soviet menghimpun warga masyarakat untuk berkumpul sambil menyanyikan lagu-lagu rakyat yang lazim dinyanyikan di rumah mereka sendiri secara publik.

Pada bulan Juni 1988 ratusan ribu orang Estoni (menurut beberapa perkiraan, sebanyak 300.000, atau sepertiga dari penduduk Estonia) berkumpul selama lima hari berturut-turut di ibukota Tallinn untuk menyanyikan lagu-lagu rakyat yang dilarang atau dianggap beresiko secara politis. Festival yang serupa diadakan musim panas itu di Latvia dan Lithuania. “Revolusi Bernyanyi” ini, sebagaimana ia kemudian dikenal, merupakan sebuah langkah penting menuju kemerdekaan dari ketiga negara Baltik tersebut dari Uni Soviet pada bulan Agustus 1991.

Sistem Soviet secara aktif berusaha menghancurkan hubungan warga masyarakat dengan identitas nasional mereka sendiri. Beberapa elemen dari identitas ini telah dihidupkan secara terbuka sampai batas tertentu yang dianggap tidak berbahaya oleh rezim (seperti *folksong* tertentu); sementara yang lainnya dinyanyikan secara sembunyi-sembunyi (terutama yang syairnya merujuk pada “Estonia” dan bukannya “Republik Sosialis Soviet Estonia”. Hal serupa berlaku bagi perayaan hari-hari libur nasional pra-Soviet, tetapi yang tetap dikenang oleh sebagian orang Estonia. Mereka yang memelihara tradisi ini menggunakannya untuk mengingatkan rekan-rekan Estonia mengenai identitas kebangsaan mereka, agar memotivasi, melindungi dan—dalam konteks *glasnost*—menyediakan cara aman untuk mengekspresikannya secara terbuka.

Festival lagu-lagu rakyat ini merangsang dan mempopulerkan gerakan perlawanan yang mulai timbul dengan cara menggunakan simbol-simbol kultural rakyat yang berpengaruh. Banyak partisipan datang ke stadion dengan mengenakan pakaian tradisional dan menyanyikan lagu-lagu rakyat yang mengangkat identitas Estonia mereka. Di bawah rezim yang telah menggunakan homogenisasi budaya sebagai alat represi, festival ini memberikan kesempatan bagi orang-orang Estonia untuk bangkit secara publik, sebagai orang Estonia yang hidup dan bukan sekadar penduduk Soviet belaka. Kehadiran 300.000 kawan-kawan sebangsa meminimalisir resiko maupun reaksi balik yang mungkin timbul dari ekspresi mereka tersebut.

Festival ini diorangisir oleh *Eesti Muinsuskaitse Selts* (Masyarakat Pewaris Estonia), sebuah organisasi non formal yang memanfaatkan situasi relatif terbuka di era *glasnost* untuk mendorong perayaan publik atas hari-hari peringatan nasional yang penting dan untuk menghidupkan kembali simbol-simbol nasional penting era pra-Soviet (seperti bendera biru hitam-dan-putih Estonia, lengkap dengan lagu kebangsaannya). Dalam perang kemerdekaan yang nyaris tidak berdarah di Baltik, simbol-simbol ini merupakan satu di antara senjata yang paling berpengaruh.

Revolusi Bernyanyi menggunakan tradisi-tradisi kultural yang secara khusus tertanam begitu dalam di negara-negara Baltik, termasuk festival lagu-lagu publik

yang dalam catatan sejarah resmi tercatat berusia lebih dari 100 tahun (walau secara informal telah dikenal selama beberapa abad sebelumnya). Kebudayaan lain mungkin memiliki tradisi yang mirip yang kuat berupa lagu-lagu, tarian, teater atau bentuk-bentuk seni atau ekspresi-ekspresi simbolik lainnya. Keluarga orang-orang yang dihilangkan di Chile—sebagai contoh—menggunakan tarian rakyat tradisional yang begitu dikenal orang Chile untuk menari secara berpasangan. Ketika seorang istri menari ‘dengan pasangannya yang hilang’ dalam sebuah tarian tradisional untuk orang berpasangan, orang-orang yang hadir dalam perayaan itu dapat memvisualisasikan kehadiran orang yang hilang tersebut dan tempatnya di dalam keluarga dan komunitas ini.

Ketika Anda ingin memobilisasi rakyat dalam jumlah besar, tantangan yang kerap kali muncul adalah bagaimana membuat mereka merasa cukup aman untuk bersuara lantang dan menyediakan jaminan bahwa mereka tidak akan sendirian. Organisator dari festival lagu-lagu ini mengandalkan keamanan dalam jumlah massa yang besar: Kehadiran ratusan ribu orang yang ikut bernyanyi menawarkan kadar keamanan tertentu bagi para partisipan, walaupun jaminan resiko keamanan itu sendiri, tidak dengan sendirinya bisa diberikan.

*Dalam kasus represi,  
tradisi kultural macam apa yang dapat mempersatukan  
orang-orang dalam komunitas Anda?*

**Memperbandingkan Kertas dengan Kenyataan:** Menyusun forum dengar pendapat publik tempat warga dapat menggugat pejabat-pejabat mengenai kesenjangan antara janji dengan kenyataan hari ini

Di India sebuah kelompok mengupayakan akuntabilitas pemerintah daerah dengan cara mengorganisir dengar pendapat publik mengenai sektor anggaran dan pembelanjaan publik. Organisator membuktikan bahwa bahkan topik alokasi anggaran—biasanya sebuah topik yang amat teknis—dapat menarik kerumunan massa.

*Meazdoor Kisan Shakti Sangathan* (MKSS) mengorganisir dengar pendapat publik di India untuk menyingkap praktik-praktik korupsi, seperti penggelapan

dana yang diperuntukkan untuk proyek-proyek pembangunan daerah, dengan membandingkan catatan pejabat dengan peristiwa-peristiwa yang sungguh terjadi, ditambah dengan laporan dari penduduk desa yang hadir.

Di India—sebagaimana di banyak negara—para pejabat dan elit pedesaan yang korup dapat memanipulasi skema-skema pembangunan untuk keuntungan mereka sendiri. Hal ini berimbas pada proyek-proyek yang tidak menguntungkan kaum miskin dan melanggengkan kemiskinan dan ketimpangan sosial.

Aktivis MKSS dan warga menyelidiki dugaan korupsi di desa-desa atau distrik-distrik, seringkali berdasarkan inisiatif dari masyarakat setempat yang merasa telah ditipu atau dilanggar hak-haknya. Pada dewan desa atau level pemerintahan daerah yang lebih tinggi, mereka meminta salinan catatan pejabat yang bersangkutan. Kendati permintaan ini sepenuhnya legal, namun kerap sekali terjadi bahwa proses memperoleh informasi ini diganjil dengan berbagai rintangan birokrasi. Sekali diperoleh, laporan itu diperiksa kembali dalam kunjungan ke lokasi dan wawancara dengan warga desa.

MKSS kemudian mengadakan dengar publik yang dihadiri oleh ratusan penduduk desa. organisator mengundang pers, pejabat pemerintah dan mereka yang diduga melakukan korupsi. Aktivis MKSS, yang kebanyakan berasal dari area tersebut, membacakan dan menjelaskan dokumen-dokumen resmi yang menyatakan, misalnya, bahwa sebuah klinik kesehatan tertentu telah dibangun di desa tersebut, atau bahwa pekerja dalam sebuah proyek konstruksi telah dibayar dengan jumlah tertentu. Dokumen-dokumen ini kemudian dikontraskan dengan peristiwa-peristiwa aktual. Para aktivis mempresentasikan hasil penyelidikan mereka dan penduduk desa yang hadir memberikan kesaksian mereka sendiri. Forum dengar pendapat publik itu sendiri berlangsung selama beberapa jam, dengan organisator mengulas sebuah proyek pembangunan atau hal korupsi. Baru-baru ini, dengar publik juga telah diorganisir di seputar pembuatan rumah sakit lokal dan sistem kesehatan publik dan di sekitar pemberfungsian skema keamanan pangan dan sistem distribusi publik.

Sementara dampak dari isu transparansi dan akuntabilitas adalah dramatis, efek dari tindak-lanjut di level resmi adalah bermacam-macam: beberapa pejabat ditangkap dan pemeriksaan pemerintah yang tengah berjalan menunjukkan adanya kemajuan. Di beberapa desa, ada pula pejabat lokal yang hadir pada forum-forum tersebut secara sukarela. Bahkan ketika dihadapkan dengan bukti-bukti kuat terindikasi korupsi, pejabat tersebut bahkan bersedia untuk bekerja sama dalam pemeriksaan dan justru mengembalikan dana! Akan tetapi lazimnya para aktivis

MKSS harus mengikuti forum publik dengan gigih, terutama berkat agitasi yang argumentatif serta tekanan-tekanan berkelanjutan sajalah, kita dapat berharap adanya tindakan resmi dari otoritas.

Esensial bagi kerja MKSS adalah akses kepada catatan pemerintah, termasuk catatan mengenai anggaran pembelanjaan publik. MKSS menggunakan rangkaian taktik untuk meyakinkan negara bagian *Rajasthan* untuk mengeluarkan Undang-Undang Hak atas Informasi. Organisasi ini memobilisasi penduduk desa dari beberapa distrik, mendirikan panggung dan membangkitkan publisitas ramai di sekitar isu bersangkutan. Sebagai hasilnya sebuah Undang-Undang dikeluarkan yang memaksa para pejabat untuk menyediakan, akses layanan murah atas salinan dokumen mengenai berbagai aspek aktivitas pemerintah, termasuk program-program pembangunan, sumber daya publik dan pembelanjaan. Perjuangan keras ini jugalah yang menyebabkan gerakan hak-hak atas informasi nasional dapat bermuara pada pengesahan Undang-Undang serupa di negara bagian lainnya, serta Undang-Undang Kebebasan Informasi di level parlemen nasional.

***Taktik apa yang dapat digunakan untuk memastikan pengeluaran pemerintah lokal Anda membantu menegakkan hak-hak dari rakyat lokal?***

“Kami telah menggunakan tuntutan atas informasi sebagai alat untuk menyatakan hak demokratis rakyat untuk mengajukan pertanyaan dan mendapatkan jawaban.

Tuntutan atas informasi khusus digunakan dengan cara yang berbeda, di tempat yang berbeda di India guna mengontrol korupsi dan penggunaan kekuasaan secara sewenang-wenang. Ini akhirnya bermuara sebagai tuntutan tidak saja bagi atas informasi, namun juga bagi pembagian kekuasaan pemerintahan”

Aktivis  
Mazdoor Kisan Shakti Sangathan, India

**Semua Politik adalah Lokal:** Dengan pendidikan dan sumber daya, mendorong pemerintah lokal, organisasi dan individu untuk melawan perundangan federal yang membahayakan HAM

Sebagaimana didemonstrasikan di sini, organisasi lokal dan pemerintah lokal dapat bekerja sama untuk menentang perundangan yang dibuat di level federal.

Di Amerika Serikat, *Bill of Rights Defense Committee*—BORDC (Komite Pembela Deklarasi HAM) menciptakan alat dan sumber daya untuk membantu para pendukung lokal. Pernyataan HAM mendidik para anggota pemerintah dan komunitas lokal mengenai bagaimana perundangan dan kebijakan anti-terorisme federal melanggar hak-hak mereka. Banyak dari kelompok lokal ini bekerja sama dengan pemerintah kota atau kabupaten untuk secara resmi mengungkapkan perlawanan terhadap pelanggaran atas kebebasan sipil, juga mengeluarkan resolusi bagi Undang-Undang yang menguatkan Deklarasi HAM. Undang-Undang ini memerintahkan penegak hukum lokal dan pegawai pemerintahan lainnya agar mengesampingkan permintaan/arahan yang melanggar hak-hak konstitusional warga negara.

Undang-Undang Patriot AS ditandatangani pada akhir 2001. Undang-Undang ini menciptakan sebuah bentuk kejahatan baru, yakni “terorisme domestik”, dan memberikan hak yang lebih besar kepada pemerintah federal untuk menyadap informasi-informasi yang bersifat pribadi (jalur telepon, memantau e-mail, melakukan pelacakan atas catatan medis, finansial dan data sekolah/kemahasiswaan), bahkan memasuki rumah dan kantor tanpa pemberitahuan sebelumnya. Di bawah Undang-Undang ini dan legislasi lainnya, pendatang yang non-warga negara dapat dideportasi dan ditahan tanpa ada kemungkinan untuk memintakan banding di pengadilan. BORDC percaya bahwa ketentuan semacam ini melanggar hak sipil dan politis mendasar yang dilindungi oleh Konstitusi Amerika Serikat.

Menyadari bahwa banyak dari kerja yang diberi kuasa oleh Undang-Undang tersebut dan kebijakan serta perundangan anti-terorisme lainnya pada akhirnya diselesaikan oleh penegak hukum lokal, sekelompok advokat (yang akhirnya akan menciptakan BORDC) menyelenggarakan sebuah forum berkemunitas luas di Northampton, Massachusetts. Mereka menyebarkan sebuah petisi untuk memperoleh dukungan bagi sebuah resolusi dewan kota untuk menentang komponen-komponen pokok dari perundangan tersebut dan meminta bahwa penegak hukum lokal menahan diri dalam menyelesaikan setiap perintah yang melanggar kebebasan sipil warga masyarakat. Mereka menerima dukungan tambahan dari pebisnis yang

prihatin, individu dan organisasi untuk berpartisipasi dalam forum-forum publik. Banyak yang bergabung dengan para aktivis untuk turut menggalang dana dan membantu mendistribusikan petisi itu, menggalang dukungan bagi resolusi pada pertemuan-pertemuan dewan kota, dengan mendemonstrasikan dukungan dan permohonan yang meluas.

Koalisi tersebut meyakinkan presiden dewan kota untuk mendukung resolusi. BORDC kemudian mulai mendorong upaya serupa di kota-kota tetangga dan di seluruh negeri. Situs *web* mereka menjadi amat penting bagi upaya-upaya pengorganisasian upaya ini. Ia menjelaskan secara rinci langkah demi langkah yang perlu diambil untuk mendidik masyarakat dan mendapatkan dukungan publik untuk mengeluarkan resolusi kotamadya. Situs itu berisikan contoh resolusi, petisi, pernyataan pers, selebaran, *FAQs* (pertanyaan-pertanyaan yang kerap diajukan) serta artikel-artikel berita terbaru. Ia juga menjelaskan bagaimana forum publik mereka diorganisasikan dan menyediakan pendekatan kampanye alternatif.

Ketika buku ini hendak dicetak, resolusi untuk isu ini telah dikeluarkan di 267 kota besar, kota kecil dan kabupaten dan di tiga negara bagian, ini mendemonstrasikan momentum yang bertumbuh untuk membatalkan ketentuan dari produk perundangan yang dapat memiliki dampak negatif terhadap HAM. Penduduk yang bergabung dalam “zona keamanan kebebasan sipil” telah mencapai 47 juta jiwa. Situs *web* BORDC juga menawarkan informasi untuk membantu mahasiswa dan fakultas, kelompok-kelompok religius, perserikatan dan kelompok-kelompok profesional mengorganisir diri.

Anggota-anggota BORDC mulai dengan cara memobilisasi perubahan di komunitas mereka sendiri dan kemudian memutuskan untuk membuat upaya mereka bersifat nasional, membagikan pengalaman mereka dengan komunitas lain. Mereka membantu kota-kota dan komunitas-komunitas mengenali bahwa masyarakat dapat mengambil sikap terhadap pelecehan HAM, mengirim signal yang kuat kepada pemerintah nasional. Walaupun hal ini terutama merupakan bentuk perlawanan yang keras terhadap sistem politik dengan otoritas yang terpisah-pisah, hal ini dapat diadaptasikan kepada sistem-sistem yang bahkan memiliki struktur politik yang vertikal, walaupun resiko bagi otoritas lokal mungkin jauh lebih tinggi.

*Bagaimana sesuatu seperti ini akan berlaku di negara Anda?*

*Adalah tanggung jawab pihak pemerintah kotamadya  
untuk memastikan bahwa warganya merasa aman  
dan terlindung oleh hukum yang adil  
dari perlakuan yang tidak adil,  
invasi terhadap rahasia pribadi tanpa penyebab yang legal  
dan penahanan tanpa dakwaan dan dalam kerahasiaan.  
Ketika kebanyakan pejabat yang terpilih secara lokal menjalankan tugas,  
mereka bersumpah untuk menegakkan  
Konstitusi negara maupun federal,  
termasuk Deklarasi HAM di kotamadya mereka*

*dari situs <[www.bordc.org](http://www.bordc.org)>*

## **Kekuatan Petisi:** Mengorganisir petisi berskala besar untuk menekan pemerintah agar berubah

Sebuah kelompok di Argentina menggunakan ketentuan dalam Konstitusi yang sedikit diketahui dan tidak dimanfaatkan untuk mendidik publik dan memobilisasi perubahan, sementara pada saat yang sama meyakinkan parlemen untuk menyetujui reformasi legislatif.

Pada tahun 2002, *Poder Ciudadano* (Kekuatan Warga) mengumpulkan tandatangan untuk petisi, yang—di bawah ketentuan konstitusional Kongres Argentina—wajib untuk dipertimbangkannya. Ketentuan konstitusional mewajibkan Kongres untuk mengkaji setiap rancangan perundangan yang dibawa ke hadapannya oleh anggota komunitas atau organisasi masyarakat, sejauh permintaan itu melibatkan tanda tangan dari 1,5% penduduk Argentina, minimal dari 6 dari 24 distrik yang ada.

*Poder Ciudadano* dibentuk pada tahun 1989 oleh sekelompok warga yang peduli atas pembelaan hak-hak sipil di Argentina. Petisinya yang dimulai beberapa tahun semenjak kejatuhan perekonomian negara ini, berfokus pada masalah pokok kelaparan dan tunjangan pensiun yang eksekutif bagi pejabat pemerintah. Petisi

yang berkaitan dengan kelaparan mengusulkan untuk memberikan makanan layak bagi semua perempuan miskin yang tengah mengandung, serta bagi anak-anak Argentina di bawah usia lima tahun. Perlu diketahui bahwa sejak ditimpa krisis perekonomian<sup>1</sup>, lebih dari separuh penduduk Argentina telah hidup di bawah garis kemiskinan. Anak-anak mewakili komponen penduduk terbesar dalam kemiskinan dan hanya sedikit program sosial yang ada untuk mengurus kelaparan anak-anak. Tujuan dari petisi tersebut tidak hanya mewajibkan Kongres untuk mengurus masalah tersebut, tetapi juga agar mengajukan usulan pemecahan masalah.

*Poder Ciudadano* sebagai penyusun petisi ini, merrekut 250 relawan di seluruh penjuru negeri dan melatih mereka dengan lembaran instruksi penting, sambil menjelaskan siapa saja yang memenuhi syarat untuk membubuhkan tanda tangan, kemana saja petisi ini harus dikirimkan serta informasi apa yang dibutuhkan para penandatanganan. Kebanyakan relawan direkrut melalui situs *web* organisasi ini, maupun secara langsung oleh koordinator *project*. Para relawan berkumpul di berbagai lokasi publik di komunitas mereka untuk mengumpulkan tanda tangan: di pasar, toko buku, apotik, kios koran dan telepon umum. *Poder Ciudadano* merangkul beberapa organisasi dan media untuk kerja sama, termasuk tokoh-tokoh radio penting yang menginformasikan mengenai lokasi tabel koleksi tanda tangan lewat program-program siarannya, serta kolom surat pembaca di surat kabar besar untuk memperbarui referensi mengenai jumlah tanda tangan yang telah berhasil dikumpulkan.

Inisiatif ini diterima dengan baik oleh penduduk Argentina dan *Poder Ciudadano* berhasil mengajukannya kepada Kongres, yang pada akhir 2002, menyetujui proposal tersebut dengan beberapa modifikasi. Inisiatif hak atas pangan ini telah mengumpulkan lebih dari satu juta tanda tangan dan diterima oleh Kongres sebagai suatu kewajiban negara. Program untuk memerangi kelaparan saat itu berada di awal implementasinya dan pusat makanan publik yang pertama tidak lama kemudian dibuka.

*Poder Ciudadano* mentransformasikan perasaan apatis yang meluas menjadi perubahan yang konkret. Orang-orang yang tidak yakin atas inisiatif pemerintah atau atas reaksinya yang begitu lambat bagi warga negara, dapat melihat bahwa suara mereka sendiri dapat membawa efek langsung terhadap perundang-undangan. *Poder Ciudadano* membangun jaringan yang kuat di antara para relawan, organisasi mitra dan media untuk menyebarkan pesan petisi tersebut dan berhasil mengumpulkan jumlah tanda tangan yang begitu besar untuk mengefektifkan

---

1 Resesi terparah antara tahun 1999 – 2002, di bawah pemerintahan Fernando de la rúa. Dari berbagai sumber (eds.)

taktik ini.

**Brigade Ember:** Mengumpulkan data kualitas udara secara independen di level komunitas dalam upaya menekan demi perubahan

Komunitas-komunitas dapat mendemonstrasikan perlawanan terhadap pelanggaran—dalam kasus ini, pelanggaran lingkungan hidup—dengan cara bertindak sendiri mengumpulkan informasi.

Banyak komunitas di seluruh penjuru Amerika Serikat telah mulai atau bergabung dengan “brigade ember”, program yang mengajari orang-orang yang hidup dekat dengan pencemar industrial (*industrial polluters*) untuk membangun dan menggunakan peralatan *pemantauan* udara yang sederhana, atau “ember”, yang telah diakui oleh U.S. *Environmental Protection Agency* (Badan Perlindungan Lingkungan Hidup Amerika Serikat). Di tengah ketiadaan hukum lingkungan hidup, standar atau badan penegak hukum yang kuat, “brigade ember” memberikan komunitas sarana untuk secara independen memantau kualitas udara lingkungan mereka dan menyediakan bukti-bukti penekan demi perubahan.

Ember itu sendiri merupakan peralatan *sampling* udara yang relatif sederhana dan tidak mahal yang terdiri dari tas *sampling* Tedlar di dalam ember plastik lima galon dan sebuah vacuum atau pompa ban karet untuk menghisap udara ke dalam tas. “Brigade ember” mencakup anggota relawan dalam tiga pekerjaan: pengendus (*sniffers*), pembuat *sample* (*samplers*) dan “koordinator ember komunitas” atau *community bucket coordinators* (CBCs). Pengendus bertanggungjawab memperingatkan penyampel bila ada insiden polusi. Penyampel menyimpan peralatan *sampling* udara di rumah mereka dan mengambil sampel ketika insiden polusi dicurigai terjadi. Mereka mencatat di mana, kapan dan mengapa sampel diambil dan menelpon CBC untuk membawa tas *sampling* dan mengatur pengiriman ke laboratorium analitis. Hasilnya dicatat di sebuah database dan diberikan kepada komunitas melalui media lokal, pertemuan komunitas dan metode lainnya. Anggota komunitas menggunakan data menurut penilaian mereka sendiri untuk meminta investigasi lebih jauh mengenai polusi dari kelompok komunitas, badan-badan pemerintah dan fasilitas-fasilitas kesehatan. Brigade juga memberikan kepada warga lembaran fakta mengenai efek-efek kesehatan yang berkaitan dengan tingkat polusi.

Komunitas berpenghasilan rendah dan minoritas di Amerika Serikat secara

husus telah menerima ide mengenai “brigade ember” dan taktik ini memperoleh penerimaan yang meluas. Perhatian media telah membantu menciptakan perubahan dalam banyak komunitas. Contra Costa County, California, mengadopsi sebuah “kebijakan keadilan lingkungan hidup”, memperkuat regulasi polusi industrial, memperluas fasilitas medis yang berhubungan dengan pekerjaan dan melibatkan warga dalam keputusan-keputusan yang berkaitan dengan industri yang berlokasi dekat pemukiman. Di Louisiana, sampel udara membuktikan bahwa lingkungan Diamond, yang secara perlahan ‘ditelan’ oleh polusi pabrik *Shell Chemical*, tidak lagi aman. Perusahaan itu akhirnya sepakat untuk merelokasi seluruh lingkungan pabriknya.

Pendekatan ini berguna ketika pemerintah atau sektor bisnis tidak menyediakan informasi mengenai polusi, atau ketika komunitas khawatir bahwa informasi yang mereka terima secara resmi adalah bias. Membentuk “brigade ember” adalah sebuah pernyataan publik yang efektif, bahwa pabrik-pabrik bahan kimia maupun badan-badan pemerintah tidak memiliki hak untuk mengontrol data mengenai polusi. Juga bahwasanya komunitas-komunitas itu sendiri dapat mengumpulkan bukti secara mandiri, menjadikannya bersifat publik dan melancarkan tekanan efektif terhadap perusahaan terkait untuk menanggapi. Metode ini sedemikian sederhana sehingga ia telah menyebar dengan cepat antar komunitas, bahkan melampaui Amerika Serikat. Taktik ini menjadikan mungkin sesuatu yang tadinya kita anggap tak lazim: korban pelanggaran (dan bukannya ‘orang luar’) yang melakukan pendokumentasian atas pelanggaran HAM. Taktik ini telah diadaptasi di Afrika Selatan, India dan Filipina.

**Melatih Korban selaku pemantau HAM:** Melatih korban pelanggaran HAM untuk mengawasi dan mempertahankan hak-hak mereka

Sebuah kelompok di Mexico melatih komunitas-komunitas suku asli untuk mengawasi pelanggaran HAM. Mereka dipersenjatai dengan ketrampilan baru dalam hal dokumentasi dan pembelaan hukum, sehingga anggota komunitas ini dapat membawakan keluhan mereka kepada level yang tertinggi.

*Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos* atau disingkat *Red*, adalah Jaringan Pembela Komunitas Chiapas yang melatih anggota-anggota komunitas asli muda untuk mengawasi dan mempertahankan hak asasi manusia

mereka.

Kehadiran militer yang ekstensif di Chiapas—sebagaimana juga meningkatnya peran paramiliter dalam konflik antara Zapatista dan pemerintah Mexico—telah mengakibatkan meluasnya pelanggaran HAM, mencakup penahanan ilegal, gangguan militer terhadap kaum sipil (khususnya di pos-pos penjagaan), pembunuhan dan penahanan tak sah, serta pelanggaran seksual terhadap kaum perempuan oleh pihak militer dan kelompok-kelompok paramiliter.

Pada 1999, *Red* melatih 14 orang yang mewakili tujuh daerah dan komunitas Chiapas. Pada 2001, kelas pelatihan pembela HAM yang kedua dimulai. Para pembela ditunjuk oleh komunitas mereka dan secara aktif melibatkan anggota-anggota komunitas dalam kerja-kerja mereka.

Melalui pertemuan reguler bulanan, para pembela dilatih mencakup bidang teori dan konsep kerja HAM, maupun ketrampilan praktis lainnya yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa pelanggaran HAM dapat didokumentasikan, dilaporkan dan dicegah. Melalui proses ini, mereka dapat mempelajari faktor-faktor yang menopang sebuah pelanggaran HAM dan bagaimana mendokumentasikannya memakai video, alat-alat fotografi dan komputer. Mereka juga belajar berbagai macam cara untuk membuat tanggapan cepat.

Para pembela mempresentasikan keluhan kepada pemerintah, memberikan informasi kepada pers dan kelompok-kelompok pemantau HAM dan mengupayakan pembebasan atau pembelaan hukum atas orang-orang yang ditahan secara tidak sah. Mereka dapat menemukan tahanan dan mempresentasikan permintaan *habeas corpus* (hak untuk segera diperiksa, dibawa ke hadapan pengadilan yang *fair*, untuk menentukan apakah seorang individu ditahan sesuai dengan hukum yang berlaku), atau ketika hak asasi ada dalam bahaya. Mereka tahu bagaimana harus mengarsip sebuah permintaan untuk mengantisipasi pelanggaran HAM akan terjadi dan siapa yang harus didekati untuk mengadakan pelanggaran ketika pelanggaran itu terjadi. Untuk kasus-kasus yang berlangsung sebelum pengadilan atau menuntut strategi hukum jangka panjang, pengacara-pengacara praktik yang profesional dilibatkan untuk memberikan nasihat kepada para pembela.

Di rumah, para pembela terlibat dalam serangkaian kerja, tergantung pada kebutuhan komunitas. Mereka mengumpulkan kesaksian dari para korban dan saksi mata dari pelanggaran hak asasi manusia, mengumpulkan video dan foto bukti dari pelanggaran dan menentukan cara yang tepat untuk mengintervensi ketika sebuah pelanggaran terjadi. Mereka juga melatih anggota komunitas lainnya dalam kerja-kerja ini.

Pendekatan ini telah mengarah kepada sejumlah keberhasilan dan juga telah meningkatkan otonomi komunitas-komunitas suku asli, dengan cara menghilangkan ketergantungan kepada aktor-aktor eksternal seperti ornop.

Model *Red* menempatkan komunitas dan para pemimpin lokal pada sentrum perjuangan untuk hak asasi manusia, dengan pihak luar melayani hanya sebagai penasihat. Melatih sebuah jaringan masyarakat lokal untuk secara independen mempertahankan HAM di dalam komunitas mereka, dapat dilakukan oleh organisasi lain yang berupaya memperkuat pembelaan HAM di daerah manapun. Taktik melatih korban pelanggaran HAM untuk mengawasi dan mempertahankan HAM dapat berperan baik meningkatkan kesadaran dan pembelaan terhadap HAM dalam komunitas-komunitas asli, sekaligus membangun kapasitas komunitas tersebut untuk berfungsi secara otonom.

*Defensores (pembela) melakukan "bantuan hukum yang pertama" .  
Yakni, mereka dilatih untuk menjadi garda depan pembela dari komunitas.  
Mereka mengerti apa itu sebuah pelanggaran hak asasi, apa yang dibutuhkan untuk mendokumentasikannya dan bagaimana melakukannya.  
Sebagai hasil dari taktik ini,  
sebuah kelompok perwakilan komunitas asli yang kokoh  
telah siap untuk menyelesaikan pembelaan hukum komunitas mereka  
dan mereka, pada gilirannya, melatih warga lainnya lagi*

*Miguel Angel de los Santos  
Red de Defensores Comunitarios  
por los Derechos Humanos, Mexico*

## Operasi *SalAMI*: 'Cari dan Sita'

Operasi *SalAMI* menggunakan apa disebut sebagai "*Citizen Search and Seizure Operation*" ("Operasi Cari dan Sita Warga Negara") untuk menekan pemerintah Kanada agar mengeluarkan perjanjian *draft* rahasia yang dipercayai oleh para aktivis dapat mengancam hak asasi manusia. Kelompok ini berhasil membangkitkan kepedulian dan kecaman publik terhadap dalih kerahasiaan yang digunakan untuk melindungi pemerintah dari evaluasi publik. Philippe Duhamel, seorang organisator dan pelatih HAM, menjelaskan operasi itu:

Selama berbulan-bulan, pemerintah secara teguh menolak untuk membuka dokumen rancangan *Free Trade Agreement of the Americas*—FTAA (Kesepakatan Perdagangan Bebas untuk benua Amerika), untuk dapat dikaji oleh masyarakat secara terbuka. Ini adalah sebuah perjanjian liberalisasi perdagangan yang tengah dinegosiasikan di antara 34 negara-negara di benua Amerika. Kami mengumumkan itikad untuk mengambil salinan dalam wujud dokumen kertas (*hard copies*) dari *draft* teks FTAA di Departemen Urusan Luar Negeri dan Perdagangan Internasional pada tanggal 1 April 2001. Pertama, kami akan menyelenggarakan sebuah demonstrasi damai di Ottawa, dengan dua pilihan skenario alternatif: kami akan menyambut penyerahan kotak-kotak dokumen tersebut kepada kami, atau kerahasiaan yang bersifat ofensif atas proses negosiasi ini akan kami *expose* ke hadapan publik. Jika teks itu tidak dikeluarkan, kami akan menggunakan blokade non-kekerasan untuk menyegel gedung dan melancarkan operasi "cari dan sita", sebagai bentuk perlawanan warga negara untuk menegakkan hak-hak atas informasi yang terkandung dalam dokumen itu, dalam sebuah aksi intervensi tegas yang berwatak non-kekerasan.

Ketika pemerintah tidak menuruti, sekelompok warga negara menyatakan, "Kami meminta Anda, petugas kepolisian, untuk melaksanakan tugas Anda membantu kami mendapatkan dokumen yang merupakan hak kami. Anda jangan mau jadi antek kerahasiaan dan manipulasi pemerintah ini. Jika Anda menolak untuk mencari dan mendapatkan teks atas nama kami, kami tidak akan memiliki pilihan selain berupaya untuk mendapatkannya sendiri". Satu demi satu, mereka kemudian memberikan nama mereka dan mengatakan, "Saya di sini untuk melaksanakan hak kami sebagai seorang warga negara. Tolong biarkan saya lewat". Kelompok kedua kemudian mulai memanjat melewati barikade. Sekitar 100 orang ditangkap dan ditangkap semalam. Tapi tak ada yang dijatuhkan status. Di seluruh penjuru

negeri, orang-orang bertanya, “Mengapa pemerintah menolak membuka dokumen tersebut dan justru lebih memilih menangkapi warga negaranya sendiri?”

Aksi tersebut, dan kampanye yang luas di sekitarnya, diliput dengan antusias oleh media di negara itu. Pemerintah dipaksa untuk bertindak. Seminggu sesudah Operasi ‘Cari dan Sita’ warga negara, pemerintah Kanada, setelah berkonsultasi dengan rekanan negosiasi lainnya, akhirnya setuju untuk menjadikan dokumen tersebut bersifat publik. Baca lebih jauh mengenai hal ini dalam buku catatan taktis yang tersedia di <[www.mewtactics.org](http://www.mewtactics.org)>, di bawah *Tools for Action*.

## Taktik Disrupsi

**Sejumlah pelanggaran HAM menuntut para pembela untuk campur tangan secara fisik guna mengakhiri pelanggaran, semata-mata agar pelanggaran tidak berlanjut. Anda dapat melobi dan berkampanye atau dapat pula memprotes, tetapi ada kalanya Anda perlu turun tangan sendiri untuk mengubah situasinya: berikan orang-orang lahan yang mereka perlukan untuk menanam atau obat-obatan yang mereka perlukan untuk bisa bertahan hidup, bawa anak-anak perempuan keluar dari rumah-rumah pelacuran, selamatkan anak-anak yang diperbudak dari pabrik-pabrik. Orang-orang pemberani yang menggunakan taktik semacam itu semuanya mengambil resiko bahaya secara fisik. Beberapa, seperti halnya para pekerja seks komersial yang terorganisasi di Bangladesh, tampaknya akan tidak mungkin menjadi partisipan, namun demikian peran mereka akhirnya menjadi sangat penting bagi upaya ini.**

## **Melawan Hukum Properti yang Tidak Adil:** Menempatkan warga tak bertanah pada lahan yang tidak tergarap untuk menekan pemerintah melaksanakan reformasi agraria

Gerakan Pekerja Tanpa Tanah Brasil (*Brazilian Landless Workers Movement*) melakukan tekanan pada pemerintah untuk melaksanakan reformasi agraria, sementara secara bersamaan menyediakan dukungan—dalam bentuk tanah pertanian yang diduduki secara damai—bagi korban pelanggaran HAM.

Sejak dibentuk pada tahun 1984, *Movimento Dos Trabalhadores Rurais Sem Terra*—MST (Gerakan Pekerja Tanpa Tanah) Brasil telah menangani isu reformasi tanah dengan cara mengorganisir kelompok-kelompok besar petani tanpa tanah untuk menduduki dan menggarap tanah-tanah terlantar milik tuan-tuan tanah yang kaya. Sesudah menduduki sebuah area, MST berupaya untuk memperoleh tanah secara legal melalui petisi dan perundangan, menggunakan sebuah pasal dalam Konstitusi Brasil yang menyatakan bahwa tanah yang tidak produktif tersedia untuk reformasi agraria.

Walaupun pemerintah Brasil telah menjanjikan reformasi agraria selama 20 tahun terakhir, hanya sedikit saja lahan yang telah sungguh-sungguh didistribusikan melalui program-program pemerintah. Setengah dari tanah Brasil hari ini dimiliki oleh segelintir 1% dari total jumlah penduduknya, sementara hampir lima juta petani sama sekali tidak memiliki tanah.

MST mengirim para organisator ke dalam sebuah area baru untuk mengontak keluarga-keluarga tanpa tanah dan merekrut mereka dalam sebuah pendudukan. Organisator berkonsultasi dengan komunitas lokal untuk memilih lokasi-lokasi terlantar dan dikenal subur, terutama yang kepemilikannya secara legal tengah disengketakan. Seringkali, organisator akan tetap ada di tengah komunitas selama enam bulan atau lebih untuk mempersiapkan aksi pendudukan tersebut bersama masyarakat lokal. Komunitas lokal membagi kerja-kerja persiapan pendudukan, agar memungkinkan mereka untuk mengambilalih kepemilikan selama proses itu. Pada hari dilancarkan aksi, keluarga-keluarga tanpa tanah berangkat menuju ke lokasi, secara damai menyeberangi setiap rintangan ke tanah itu dan mendudukinya. Jika mereka diusir, mereka akan meninggalkannya secara damai, tetapi akan kembali lagi ke tempat yang sama ketika perintah pengusiran telah berakhir.

Pendudukan itu berhasil menarik perhatian badan nasional yang mengurus reformasi agraria, sementara para aktivis terus melancarkan aksi-aksi tekanan di level legalisasi atas pendudukan itu. Sebagai bagian dari tekanan ini, MST

mengorganisir gerakan demonstrasi umum dan menduduki bangunan-bangunan pemerintah dan secara publik mengecam pemerintah atas kegagalannya untuk menepati mandat konstitusionalnya. Proses legalisasi dapat berlangsung sampai lima tahun. Begitu sebuah penyelesaian ditetapkan, sekolah-sekolah dan klinik kesehatan didirikan dan tanah digunakan untuk pertanian berkelanjutan, yang memungkinkan para warga untuk mengakses hak mereka atas pangan. Taktik ini telah sangat berhasil, walaupun kadang-kadang harus berhadapan dengan kekerasan. MST telah mendapatkan tanah untuk sekitar 250.000 keluarga yang hidup di lebih dari 1.600 tanah-tanah pendudukan.

Kisah MST adalah sesuatu yang istimewa: pendudukan secara damai mengarah kepada perubahan konkret bagi ribuan orang yang kini dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri secara agrikultural. Sementara pendudukan itu sendiri memang memiliki resiko dan bahaya, namun jika dikombinasikan dengan tekanan terhadap pemerintah untuk melaksanakan reformasi agraria yang dijanjikan bisa mendatangkan hasil signifikan. MST dapat secara damai menggunakan taktik ini dengan memastikan partisipasi jumlah massa yang memadai. Jika pemilik tanah atau otoritas lokal menggunakan kekerasan dalam melawan pendudukan secara damai, aktivis-aktivis MST melancarkan tekanan melalui perhatian media.

Harus diakui ada pula sejumlah contoh kasus pendudukan tanah di tempat-tempat lainnya yang tidak diorganisir secara damai, sehingga justru mengakibatkan insiden kekerasan yang berdarah. Penggunaan dari taktik ini memiliki resiko cukup besar dalam sejumlah konteks dan harus sangat hati-hati dalam perencanaan dan level pelaksanaannya untuk memastikan watak sejatinya yang non-kekerasan.

***Kapan Anda menggunakan taktik yang tidak sah menurut hukum untuk memastikan akses kepada HAM dan secara keras menekan pemerintah untuk berubah?***

*Hukum Reformasi Agraria menyatakan bahwa semua properti harus memiliki fungsi sosial, atau harus dipergunakan secara produktif untuk menghasilkan pekerjaan atau makanan. Perjuangan kami memiliki hukum sebagai pendukung, tetapi jika kami membiarkan pemerintah yang melakukan reformasi agraria, hal itu tidak akan terjadi karena pemilik-pemilik tanah yang utama memiliki banyak kekuasaan di Kongres Nasional dan Senat.*

*Wanusa Santos*  
Movimento Dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, Brasil

## **Menentang Hukum Paten Internasional:** Melakukan pembangkangan sipil dalam upaya melancarkan tekanan untuk mengubah Undang-Undang Paten tentang obat-obatan HIV/AIDS

Di Afrika Selatan *Treatment Action Campaign*—TAC (Kampanye Aksi Penyembuhan) melibatkan diri dalam pembangkangan sipil dengan cara ‘membelejeti’ Undang-Undang terkait dan menekan pemerintah agar mengubah Undang-Undang tersebut untuk memastikan perawatan bagi para penyandang HIV/AIDS.

Pada Juni 2000, TAC mulai mengimpor obat-obatan HIV/AIDS generik dengan mengenyampingkan hukum paten, TAC juga mencoba menekan perusahaan farmasi agar mengurangi biaya obat dan memaksa pemerintah Afrika Selatan untuk mengizinkan impor versi generik dari obat-obat paten. Tujuan taktik ini adalah untuk meningkatkan akses kepada obat-obatan HIV/AIDS yang dapat diraih oleh semua orang di Afrika Selatan. Lebih dari empat juta orang di Afrika Selatan terinfeksi HIV, akan tetapi harga obat-obatan paten yang begitu mahal telah mendatangkan kesukaran untuk perawatan masyarakat pada umumnya.

*Fluconazole* adalah obat penting yang digunakan untuk menyembuhkan penyakit yang berkaitan dengan HIV. Seperti banyak obat-obatan HIV/AIDS lainnya, *Fluconazole* diproduksi oleh perusahaan multinasional di bawah perlindungan hak paten dan diimpor ke Afrika Selatan dengan harga yang sangat tinggi. Versi generik dari obat itu sendiri sebenarnya jauh lebih murah. Akan tetapi, pemilik paten obat tersebut, perusahaan *Pfizer*, telah mencegah pemerintah Afrika Selatan untuk mengimpor versi generik tersebut. Walaupun Undang-Undang Hak Paten Afrika Selatan memberi kekuasaan kepada pemerintah untuk mengimpor atau memproduksi salinan yang murah dari obat-obatan paten, pemerintah tidak berusaha menggunakan kewenangan ini.

Sebelum mengimpor obat-obatan, TAC bekerja sama dengan WHO (Organisasi Kesehatan Dunia) dan *Medecins Sans Frontieres* untuk mengonfirmasikan tingkat keamanan dan efektivitas obat-obatan tersebut dan mengatur sistem pembelian dan impornya. Sebagai contoh, TAC mengorganisir sebuah perjalanan ke Muangthai, di mana bentuk generik dari *Fluconazole* yang disebut Biozole tersedia bagi publik dengan harga kurang dari 0,28 dolar AS per tablet.

Namun ketika tablet Biozole mencapai perbatasan, Dewan Pengontrol Obat-Obatan Afrika Selatan justru menyitanya, sementara para anggota dari Dewan sendiri masih meributkan isu ini. Pada bulan November 2000, di bawah tekanan

dari TAC dan para mitra internasional dan lokalnya, Dewan mengizinkan obat generik untuk didistribusikan kepada pasien oleh salah satu mitra TAC. Perusahaan farmasi Pfizer berjanji untuk mengedarkan obat-obatannya sendiri kepada pasien pada Maret 2000. Sungguhpun pembebasan tersebut—sebuah pelaksanaan dari kewenangan bebas pemerintah—masih akan ditinjau lagi begitu pengedaran ini sungguh-sungguh terjadi.

Dengan menarik perhatian pada alternatif berbiaya rendah, aksi pembangkangan sipil ini menunjukkan urgensi kebutuhan akan akses murah atas obat-obatan HIV/AIDS. Para aktivis mempersiapkan diri untuk menghadapi konsekuensi dari tindakan melanggar hukum tersebut demi menyelamatkan nyawa manusia, sambil melancarkan tekanan memadai untuk mempengaruhi kebijakan nasional.

Bahkan dengan menentang hukum Afrika Selatan dan kesepakatan hak paten internasional dengan cara mengimpor obat-obatan generik, TAC juga mendukung pemerintah Afrika Selatan dalam sebuah kasus yang dibawa oleh 39 perusahaan farmasi di bawah naungan *Pharmaceutical Manufacturers' Association*—PMA (Asosiasi Perusahaan Farmasi). PMA menuduh bahwa Undang-Undang tentang Obat-Obatan, yang mencakup ketentuan yang mengizinkan pemerintah untuk mengimpor obat paten dari negara lain jika tersedia dengan harga yang lebih murah, melanggar Undang-Undang hak paten. Pada akhirnya PMA menarik sendiri kasusnya.

Afrika Selatan masih terus hidup di bawah krisis hak asasi manusia yang menghantui: jutaan orang penyandang HIV/AIDS ternyata tidak memiliki akses kepada obat-obatan yang efektif. Akan tetapi pada bulan Agustus 2003, di bawah tekanan TAC, pemerintah Afrika Selatan setuju untuk memberikan akses atas obat anti-*retroviral* secara gratis bagi semua orang Afrika Selatan. Pemerintah juga mengonfirmasikan janji ini dalam sebuah program kesehatan baru yang diumumkan pada bulan November tahun yang sama.

## **Membawa Perempuan-perempuan Muda Keluar dari Rumah-rumah Pelacuran:** Menggunakan orang-orang berpengalaman dan berpengetahuan langsung untuk menyelamatkan korban pelanggaran HAM

Di Bangladesh, sebuah perhimpunan lokal mengintervensi aktivitas-aktivitas sektor swasta yang melanggar HAM. Perhimpunan Pekerja Seks *Ekota* di Bangladesh menggunakan tim pemantau yang terdiri dari pekerja seks yang lebih senior untuk menyelamatkan anak-anak perempuan yang ditahan di luar kemauan mereka sendiri di rumah-rumah pelacuran.

Pekerja seks senior memainkan peran penting dalam perdagangan seks. Kebanyakan dari mereka juga berprofesi sebagai 'Induk Semang' atau menyewakan kamar kepada para pekerja seks yang tinggal di rumah pelacuran. Mereka memiliki lebih banyak waktu senggang dibanding pekerja-pekerja muda dan lazimnya memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai industri tersebut. Posisi mereka dalam kekuatan ekonomi di dalam rumah pelacuran menawarkan kepada pekerja seks senior ini kemampuan unik untuk mempengaruhi siapa yang bisa tinggal di rumah pelacuran. Jadi ketika mereka menyewakan pemondokan sementara kepada para pekerja seks yang lebih muda, mereka seyogianya memastikan bahwa tidak ada anak perempuan di bawah umur di situ.

Kendati adanya kebijakan ini, bagaimanapun, pekerja seks yang lebih muda terkadang membawa serta anak-anak perempuan ke dalam rumah pelacuran. Ketika ini terjadi, para pekerja seks senior menelusuri di mana anak-anak perempuan itu ditahan dan berkomunikasi dengan mereka melalui jendela kecil atau celah di dinding. Mereka mencoba mencari tahu apakah anak itu datang ke sana atas kemauannya sendiri; juga seputar desa tempat ia berasal, usia maupun kerabat dekatnya. Mereka kemudian memberitahukan Perhimpunan Pekerja Seks *Ekota*, yang akan mengirim orang kepercayaan ke kampung asal anak perempuan itu, untuk menginformasikan kepada orang tua atau kerabat mengenai keberadaannya. Dalam banyak kasus pihak keluarga bisa datang menjemput langsung ke rumah pelacuran untuk menyelamatkan anak perempuan tersebut. Akan tetapi dalam beberapa kasus lainnya, justru pihak keluarga itu sendirilah yang telah menjual anak perempuannya ke dalam kubangan prostitusi sehingga tidak akan dapat membantunya.

Ketika mulai menyelamatkan anak-anak perempuan dari rumah pelacuran, Perhimpunan Pekerja Seks *Ekota* mengontak sejumlah ornop untuk mendukung

kerja mereka dan membantu anak-anak perempuan itu. Pihak ornop memainkan peran penting dalam merehabilitasi anak-anak perempuan yang tidak dapat kembali kepada keluarga mereka.

Kendati mereka telah berupaya keras untuk meniadakan anak-anak perempuan di bawah umur dari rumah-rumah pelacuran, namun para pekerja seks itu hanya menerima sedikit saja dukungan dari komunitas lokal, yang memandang prostitusi sebagai sebuah ancaman sosial. Di samping itu, penyelamatan anak-anak oleh para pekerja seks mengancam 'dapur' orang-orang yang mendapatkan keuntungan dari perdagangan seks. Ini menempatkan para pekerja seks senior dan asosiasi tersebut dalam posisi terancam. Oleh karena itu para perempuan senior itu bergantung pada ornop lokal untuk dukungan dan *lobby* dengan para pejabat pemerintah lokal agar meningkatkan perlindungan bagi para pekerja seks dan meniadakan praktik prostitusi di bawah umur .

Efektivitas taktik ini sebagian besar dikarenakan dukungan pekerja seks senior—dengan posisi uniknya—yang bersedia turun tangan langsung untuk mengawasi dan mengenali permasalahannya. Mereka juga membangun jaringan yang solid, melalui perhimpunan mereka, untuk dapat mengumpulkan dan menyampaikan informasi secara aman. Taktik ini mengintervensi tahap yang paling akhir dari pelanggaran; ketika anak-anak perempuan itu telah berada di dalam rumah pelacuran, seraya memfasilitasi pemindahan fisik dari situasi tersebut. Kelompok tereksplotasi lainnya—seperti penyintas dari pelanggaran domestik (KDRT), tenaga kerja paksa atau buruh migran paksa—akan juga berada dalam posisi untuk menggunakan pengalaman ini agar orang-orang lain bisa terhindar dari jeratan pengalaman pahit yang serupa. Tetapi adalah penting untuk mencatat bahwa mereka—seperti halnya para perempuan pemberani di Bangladesh ini—sudah terlebih dahulu menempatkan diri mereka sendiri dalam ancaman fisik.

## **Mendobrak Pintu-Pintu Pabrik:** Menyelamatkan buruh anak melalui intervensi langsung ke dalam pabrik

Di India, *South Asian Coalition on Child Servitude*—SACCS (Koalisi Asia Selatan anti Perbudakan Anak) melakukan intervensi secara fisik dengan menyelamatkan para buruh anak. SACCS mengorganisir intervensi dan berbagai operasi penyelamatan untuk membebaskan buruh anak. SACCS sendiri adalah sebuah aliansi luas yang terbentuk dari lebih 400 kelompok HAM di seluruh Asia Selatan, ia bertujuan untuk memberantas tenaga kerja paksa maupun buruh anak.

Organisasi Buruh Internasional (ILO) dalam laporannya menyatakan bahwa terdapat lebih dari 60 juta buruh anak yang terpenjara di India. Anak-anak ini diingkari hak-hak fundamentalnya atas masa kanak-kanak, juga tercerabut dari akses pendidikan, upah yang adil dan atas perawatan kesehatan dan kondisi hidup yang memadai, karena dipaksa bekerja lebih dari 12 jam sehari. Kebanyakan dari mereka ditahan sebagai budak di berbagai pabrik tempat mereka menjadi subyek dari penganiyaan dan penyakit ganas yang menular.

Sejak permulaan pembentukannya pada tahun 1989, SACCS telah menangani problem ini dengan menggunakan strategi bercabang dua yang melibatkan aksi langsung maupun aksi tidak langsung. Dalam Operasi Penyelamatan Aksi Langsung, SACCS merencanakan serbuan kepada industri-industri yang ditengarai mempekerjakan buruh anak. Sesudah mengkaji informasi valid yang mengidentifikasi sebuah industri pengguna buruh anak atau menerima laporan dari orangtua dari anak yang terkena kasus tersebut, SACCS mengorganisir timnya sendiri. Tim ini terdiri dari keluarga dari anak-anak yang diculik, pemandu lokal dan beberapa polisi yang dipersenjatai tingkat pemukul untuk secara paksa membebaskan anak-anak tersebut. Lantas mereka mendobrak pintu-pintu pabrik yang menyekap anak-anak pada malam hari dan mencegah usaha pemindahan anak-anak tersebut sebelum pihak pemilik menyadari betul hal ini. Dalam upaya untuk mengamankan perlindungan bagi para anggota polisi, pihak pemerintahan lokal diinformasikan mengenai rencana serangan ini, namun rincian kontak dan lokasi pasti tidak akan disingkapkan untuk menghindari kolusi antara pihak otoritas dan pelaku bisnis anak.

Setelah anak-anak dibebaskan, sertifikat pembebasan resmi mereka harus segera diamankan dari jangkauan otoritas lokal. Ini penting agar—menjauhkan kemungkinan kolusi antara otoritas dan pelaku bisnis—yang dapat membuat status kasus ini terkatung-katung. Anak-anak kemudian diperkenalkan dengan

program rehabilitasi SACCS yang menyediakan pendidikan gratis sebelum akhirnya dikembalikan kepada keluarga mereka masing-masing, jika hal ini memang memungkinkan. Melalui serangan aksi langsungnya SACCS telah membebaskan lebih dari 65.000 buruh anak dari praktik-praktik perbudakan sepanjang dua dekade terakhir ini.

SACCS mengintervensi secara langsung pada lokasi pelanggaran: pabrik-pabrik di mana anak-anak ditahan sebagai budak. Aksi mereka tidak hanya menyelamatkan ribuan anak-anak, tetapi juga membangun kesadaran komunitas mengenai problem itu, ketika informasi mengenai praktik perbudakan/buruh anak ini tersebar di media. Aksi-aksi mereka juga mendesak pemerintah (atau 'oknum-oknum' di dalamnya) untuk tidak lagi terlibat dalam bisnis perbudakan/buruh anak. Dengan *expose* SACCS yang begitu masif atas praktik-praktik perbudakan anak ini, pemerintah tidak lagi dapat melindungi bisnis gelap ini dari sorotan publik.

Ini juga merupakan sebuah taktik berbahaya yang dapat mendatangkan akibat-akibat tidak langsung atas para buruh anak dan komunitasnya. Di tinjau dari sudut pelaku bisnis, taktik ini bisa memaksa pabrik-pabrik gelap ini untuk menyembunyikan problem lebih dalam lagi atau bahkan merelokasi ke area yang lebih jauh dan terpencil. Para anggota tim SACCS sendiri juga rentan terhadap ancaman fisik dan perlu merencanakan sejumlah kemungkinan lain. Tetapi ketika masalahnya sudah sedemikian ekstrem—apakah itu menyangkut perbudakan anak, perdagangan manusia atau penahanan yang tidak sah menurut hukum—memang dibutuhkan orang-orang yang berani menanggung resiko untuk menjawab permasalahan ini.

# Mengubah Taktik

**Mengetahui kapan waktunya untuk berganti taktik dapat menjadi sama pentingnya dengan mengetahui taktik apa yang harus dilancarkan pertama kali. Koalisi Burma Merdeka (Free Burma Coalition) baru-baru ini memutuskan untuk mengakhiri masa kampanye sepuluh tahunnya memboikot terhadap PepsiCo, Apple Computer, Heineken, Texaco dan perusahaan-perusahaan lain yang melakukan bisnis di Burma—bukan karena kampanye tersebut telah menjadi tidak efektif atau karena koalisi itu telah meraih semua tujuannya—tetapi karena sudah waktunya untuk berganti taktik. Zar Ni, salah seorang pendiri koalisi itu, menjelaskan:**

**Boikot memiliki banyak hal potensial untuk melakukan kebaikan. Mereka dapat menjadi seperti artileri berat dalam operasi militer: Mereka melemahkan musuh, tetapi pekerjaan sebenarnya dilakukan oleh orang-orang di lapangan, di negara itu sendiri. Dan, sekali Anda telah berhasil melemahkan lawan Anda, Anda harus siap melancarkan hantaman mematikan berikutnya.**

**Boikot membangkitkan kesadaran mengenai situasi di Burma dan meyakinkan beberapa perusahaan internasional untuk keluar dari negara ini, tetapi hal itu sendiri tidaklah cukup.**

**Kami secara resmi mengakhiri boikot pada tahun 2003 karena kami menyadari bahwa kami perlu menggunakan seperangkat taktik baru untuk mulai membingkai kembali isu kami dan membawa kampanye kami ke level berikutnya. Kami menyadari bahwa jika kami tidak mengubah cara orang bertutur tentang Burma, kami tidak akan menang. Dengan boikot sebagai bagian utama dari kampanye, fokusnya akan selalu berada pada rezim dan bukan pada rakyat Burma. Kami perlu memfokuskan perhatian pada rakyat dan jalan kami sendiri ke masa depan.**

**Sekarang kami sedang mengeksplorasi mitra-mitra strategis dengan pihak lain yang terlibat dalam kampanye hak asasi manusia internasional. Membingkai kembali isu dan menginkorporasikan taktik baru ke dalam kampanye kami akan membuka jalan strategis baru dan pilihan-pilihan baru bagi kami.**

## Taktik Persuasi

Taktik persuasi digunakan untuk mengakhiri pelanggaran HAM tanpa konfrontasi, tanpa mengutuk pelanggar atau pihak-pihak yang memfasilitasi pelanggaran. Seringkali pelanggar 'hanya' membutuhkan dukungan atau dorongan untuk mengakhiri partisipasi mereka dalam pelanggaran HAM.

Sementara taktik intervensi sering dikaitkan dengan protes dan perlawanan, beberapa dari keberhasilan yang paling dramatis dalam mengakhiri pelanggaran hak asasi manusia justru telah dihasilkan dari negosiasi dan persuasi. Melalui tekanan yang terkadang secara diam-diam dan terkadang secara lebih kentara, para pembela HAM dapat melakukan perbaikan yang signifikan dalam lapangan kemanusiaan, seringkali dengan sangat cepat. Taktik ini menggunakan hubungan yang tidak konfrontatif dengan kalangan pemerintah dan pelaku bisnis, bahkan menawarkan bantuan untuk mengakhiri pelanggaran. Taktik ini menempatkan para tokoh masyarakat yang dihormati sebagai ujung tombak negosiasi dan upaya-upaya pembelajaran. Taktik ini juga beroperasi di dalam suasana kerja sama.

Orang-orang serta hubungan baik merupakan sumber daya yang penting untuk dipertimbangkan untuk mengevaluasi gudang taktik yang tersedia bagi Anda. Siapa yang dekat dengan target Anda? Siapa sajakah yang dihormati oleh mereka? Siapa pula yang dapat mempengaruhi target Anda?

**Kekuatan Gelombang Udara:** Menggunakan media elektronik untuk mengirimkan pesan yang ditargetkan untuk orang-orang yang memiliki kapasitas mengakhiri pelanggaran

Para jurnalis dapat menggunakan posisi mereka dalam masyarakat untuk membangkitkan kesadaran mengenai pelanggaran HAM dan untuk mempengaruhi

pihak yang berkuasa untuk melakukan perubahan. Melalui siaran radio, jurnalis-jurnalis di Burundi dapat membujuk tokoh-tokoh kunci untuk mengakhiri pelanggaran HAM yang berlangsung di rumah sakit.

*African Public Radio*—APR (Radio Publik Afrika) menggunakan kekuatannya sebagai entitas media untuk mempengaruhi individu dan kelompok yang dapat membantu membenahi situasi di sejumlah rumah sakit Burundi, di mana orang-orang miskin ditahan di luar kehendak mereka karena tidak sanggup lagi membayar tagihan. Pada akhirnya, dengan menjalin kemitraan dengan ornop-ornop lokal, APR sukses menekan pemerintah untuk memerintahkan pembebasan orang-orang tersebut.

Di Burundi yang dihantui konflik bersenjata, banyak orang tidak sanggup mendapatkan perawatan medis yang dibutuhkan. Tambahan bagi problem tersebut, kemacetan sistem umum pada tahun 1990-an mengurangi kapasitas pemerintah untuk mendukung sistem kesehatan. Menghadapi krisis anggaran dan hutang yang kian meningkat, sejumlah rumah sakit di Burundi mulai melakukan penahanan pasien-pasien yang tidak sanggup membayar tagihan. Karena pihak pengelola rumah sakit merasa bahwa mereka diperlakukan tidak adil oleh para pasien yang tidak membayar, mereka sama sekali tidak melihat hal ini sebagai sebuah masalah kemanusiaan.

Setelah memperoleh akses kepada para tahanan dan memenangkan kepercayaan mereka, APR secara rahasia mewawancarai mereka dan menyiarkan kesaksian mereka. Penyiaran tersebut mencakup pesan-pesan yang ditargetkan kepada kelompok-kelompok dan individu-individu tertentu yang memiliki kekuasaan untuk membenahi situasi. Setelah penyiaran pertama, APR menjalin kekuatan dengan ornop nasional dan internasional, mengadakan *café presse*—sebuah konferensi pers terinci—mengenai perawatan kesehatan bersama pejabat-pejabat pemerintah dan orang-orang berpengaruh lainnya. Diskusi final mengatasi masalah penahanan atas para pasien dan meletakkan tekanan moral atas pemerintah untuk segera bertindak.

Pada bulan April 2002, Dewan Kementerian melarang penahanan oleh pihak rumah sakit dan memerintahkan berbagai rumah sakit terkait untuk segera membebaskan seluruh tahanan. Pemerintah juga menciptakan sebuah komisi untuk mempelajari isu yang lebih besar mengenai akses perawatan kesehatan dan reformasi kebijakan kesehatan nasional.

Elemen kunci dari taktik ini adalah pada identifikasi target penyiaran: kelompok atau kelompok-kelompok manakah yang akan memiliki kapasitas untuk mengubah

situasi di rumah sakit dan pada saat bersamaan memiliki sifat reseptif terhadap pesan ini? Dalam kasus ini, adalah pejabat-pejabat pemerintah, yang secara moral terikat untuk bertindak setelah kisahnya tersiar ke hadapan publik. Taktik ini juga mendemonstrasikan kekuatan dari penuturan. Kisah para korban, ketika berada di tangan orang-orang yang memiliki akses ke panggung nasional, dapat mengubah kebijakan nasional.

Akan tetapi taktik ini juga dapat mendatangkan pukulan-balik—sebagaimana dikuatirkan oleh beberapa orang—jika pihak rumah sakit memutuskan untuk menolak perawatan bagi pasien yang telah muncul dalam program radio di masa mendatang. Sorotan atas kasus ini mungkin pula menantang rasa malu bagi pasien-pasien tertentu, jika terdapat stigma tertentu atas penyakit mereka. Agar berhasil, taktik ini menuntut jurnalis untuk terlibat dalam dan bersedia bekerja demi perbaikan hak asasi manusia.

Bagaimana siaran radio bisa digunakan untuk menginformasikan masyarakat mengenai masalah HAM Anda dan untuk melakukan tekanan demi perubahan?

### **Mendaftarkan Pemimpin-Pemimpin Lokal untuk Mengakhiri Kebiasaan Berbahaya:** Melibatkan pemimpin-pemimpin lokal dalam menggunakan pengaruh mereka untuk membantu mengakhiri pelanggaran HAM

Ketika mencari sekutu dalam sebuah kampanye untuk mengakhiri pelanggaran HAM, pemimpin-pemimpin lokal adalah pilihan yang alamiah. Mereka bisa menjabat sebagai para pemimpin suku, sesepuh, pemimpin agama, politisi lokal atau semata-mata individu dengan karisma dan pengaruh.

Komisi HAM dan Keadilan Administratif di Ghana memintakan dukungan dari para pemimpin komunitas yang dihormati—para Tetua Suku dan Ibu Suri—untuk mengurus problem *trokosi*, sebuah adat yang menempatkan perempuan dan anak-anak perempuan dalam kerangkeng di makam keramat di luar kemauan mereka. Pihak keluarga membiarkan anak-anak perempuan itu dibawa ke makam sebagai silih untuk memperbaiki kesalahan atau kejahatan yang dilakukan oleh anggota keluarga. Dengan demikian diyakini bahwa hal ini akan mengakhiri atau membalikkan nasib buruk yang menimpa sebuah keluarga.

Komisi sendiri sesungguhnya memiliki kapasitas untuk menegakkan hukum melawan *trokosi*, tetapi mereka mengambil taktik persuasi ini karena menyadari bahwa tradisi itu didasarkan pada keyakinan yang dihayati secara mendalam. Sehingga jika tidak ditransformasikan secara sukarela, mungkin praktik-praktik ini akan terus berlangsung secara diam-diam. Untuk menyiapkan kampanye ini, pihak Komisi melakukan penelitian mengenai kepercayaan di balik *trokosi* dan membangun aliansi dengan *International Needs Ghana*, sebuah orop yang memberikan nasihat dan merehabilitasi mantan korban *trokosi*. Secara bersama mereka menyelenggarakan pertemuan dengan pihak korban dan pendeta adat di mana setiap orang didorong untuk berbagi pandangan masing-masing.

Para pemimpin lokal kemudian membantu Komisi menekankan kebutuhan untuk meninggalkan praktik-praktik ini dan menggunakan posisi mereka dalam komunitas untuk meyakinkan pendeta adat agar membebaskan anak-anak perempuan tersebut. Upacara pembebasan mengumpulkan komunitas untuk secara publik bersama-sama mengakui keputusan pendeta dan membantu memenuhi kebutuhan spiritual komunitas. Upacara ini diliput oleh media, mendemonstrasikan kepada publik yang lebih luas bahwa para pemimpin lokal mendukung pengakhiran atas praktik-praktik lama tersebut. Taktik ini telah membebaskan sekitar 3.000 perempuan dan anak-anak. Baca lebih jauh mengenai hal ini dalam buku catatan taktis yang tersedia di <[www.newtactics.org](http://www.newtactics.org)>, di bawah *Tools for Action*.

Jika kita hanya sekadar menghimbau dan melarang praktik-praktik tradisional tanpa mengatasi kepercayaan dan struktur mengakar yang menjadi pondasinya (atau tanpa memberikan alternatif yang memungkinkan kepercayaan dan struktur itu untuk sekaligus ditransformasikan), maka kita bisa mendorong komunitas untuk menyembunyikan praktik tersebut ketimbang mengakhirinya. Taktik ini tergantung pada penghormatan komunitas kepada para pemimpinnya, dan kesediaan dari para pemimpin tersebut untuk menetapkan contoh untuk diikuti oleh komunitas. Untuk mengakhiri praktik *trokosi*, adalah penting bahwa komunitas diyakinkan bahwa mereka tidak perlu menyerahkan anggota keluarga mereka kepada pendeta adat demi memperbaiki dosa-dosa mereka. Ritual pembebasan dan jaminan baru dari para pemimpin komunitas adalah penting untuk mengangkat ketakutan atas tindakan pembalasan dari dewa-dewa dan juga dalam membangun kepercayaan di dalam komunitas.

Taktik ini dapat berguna dalam membantu mentransformasikan atau menghapuskan praktik-praktik melanggar HAM yang telah mengurat-akar secara tradisional atau sosial lainnya (seperti pemoangan alat kelamin perempuan, kekerasan domestik dan lain-lainya).

## **Menelusuri Uang:** Memeriksa anggaran untuk menyingkapkan ketidakadilan sosial dan ekonomi dan membujuk pemerintah agar membenahinya

Kadangkala para tokoh masyarakat secara individual memiliki kapasitas moral dan politik yang lebih tinggi atas pemerintah, dan terkadang angka dan data bisa berbicara sendiri. Analisis anggaran dapat menyingkapkan ketidakadilan dalam pemenuhan hak sosial dan ekonomi, dapat pula menjadi alat untuk membujuk pemerintah agar membenahi ketidakadilan ini dan dapat membantu untuk menjaga komitmen pemerintah atas akuntabilitas.

Unit Anggaran Anak-Anak (*Children's Budget Unit—CBU*) pada *Institute for Democracy in South Africa—IDASA* (Institut untuk Demokrasi di Afrika Selatan) menggunakan anggaran nasional dan provinsi untuk menyingkapkan apakah pemerintah memenuhi komitmennya dalam melindungi hak anak dan menyiapkan bukti dan rekomendasi untuk membenahi kegagalan tersebut. Konstitusi Afrika Selatan menyatakan bahwa tiap anak memiliki hak atas nutrisi dasar, tempat berlindung, perawatan kesehatan dan pelayanan sosial. Akan tetapi, jutaan anak kelaparan, tidak memiliki sarana material untuk bersekolah atau menerima perawatan kesehatan dan oleh karena itu tidak mungkin dapat hidup sehat dan aman.

CBU pertama-tama menelusuri kewajiban pemerintah berdasarkan Konstitusi dan komitmen internasional. Ia kemudian mengukur luasnya kemiskinan anak. Ini diikuti dengan sebuah analisis komprehensif mengenai alokasi anggaran dan pembelanjaan serta pemberian pelayanan pokok bagi anak-anak, menyingkapkan prioritas-prioritas fiskal pemerintah. Analisis dan kompilasi fakta anggaran ini memungkinkan CBU untuk secara jelas menggambarkan dalam hal apa saja pemerintah nasional, provinsi atau lokal tidak memenuhi kewajibannya. Ini juga menyediakan fakta dan data yang solid. Dari situ dapat dibuat rekomendasi dan tekanan yang kuat untuk perubahan. Dalam beberapa kasus, pemerintah bahkan tidak mengumpulkan data ini dan menerima data yang disediakan oleh IDASA sebagai cara untuk memperbaiki kinerja mereka sendiri.

Taktik ini telah menghasilkan perundangan baru dan hubungan yang lebih baik dengan institusi pemerintah pokok, yang beberapa darinya kini meminta informasi dari CBU. Taktik ini telah menyebar secara global, dengan unit-unit *pemantauan* serupa yang tengah dibuka di bagian-bagian Asia, Amerika Selatan dan di seluruh penjuru Afrika.

Baca lebih jauh mengenai hal ini dalam buku catatan taktis yang tersedia di <[www.newtactics.org](http://www.newtactics.org)>, di bawah *Tools for Action*.

Untuk memantau program pemerintah, CBU mengumpulkan informasi yang tidak dapat atau tidak hendak diperoleh sendiri oleh pemerintah. Taktik ini menggabungkan dua wacana yang terpisah secara historis—mengenai analisis anggaran dan HAM—untuk memperbaiki transparansi anggaran, akuntabilitas dan praktik pemerintahan yang lebih baik. Alih-alih menjadi musuh, CBU membujuk pemerintah untuk menerima, menggunakan dan bahkan meminta data ini dalam upaya memperbaiki kehidupan anak-anak dalam komunitas. CBU juga memelihara peran *pemantauannya* untuk memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan dapat dipercaya dan dapat digunakan oleh para *pe-lobby* HAM di level negara. Untuk melakukan pekerjaannya, CBU membutuhkan akses kepada anggaran, yang mungkin tidak tersedia dalam masyarakat yang kurang terbuka. Langkah pertama dalam menggunakan taktik semacam itu, adalah untuk memastikan bahwa hukum lokal memungkinkan publik untuk mengakses informasi anggaran dan untuk mendesak akses ini, jika tidak tersedia.

Taktik ini dapat digunakan untuk memantau komitmen pemerintahan nasional dan lokal, komitmen donor, bantuan asing dan Kebijakan-kebijakan Strategis Pengurangan Kemiskinan (*Poverty Reduction Strategy Policies*), maupun kondisi-kondisi yang harus dipatuhi pemerintah dalam rangka mengakses tipe-tipe bantuan dana tertentu dari institusi-institusi seperti *World Bank* dan *International Monetary Fund*. Pendekatan anggaran juga dapat menunjukkan program apa yang tengah dibuat pada rentangan yang luas dari isu hak asasi manusia, termasuk hak kaum cacat, hak atas pendidikan, perumahan dan kesehatan.

Anggaran adalah rencana operasional pemerintah  
untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi rakyat kami.  
Ini menetapkan apa yang akan Anda bayar dalam pajak,  
bagaimana kami akan membelanjakan uang itu  
dan apa yang akan kami berikan.  
Ini adalah sebuah sintesis dari semua kebijakan pemerintah kami.  
Anggaran adalah kontrak kami dengan negara

Trevor Manuel  
Menteri Keuangan, Afrika Selatan

## **Mengadabkan Birokrat:** Membangun hubungan kerja sama dengan pejabat pemerintah untuk mempromosikan perubahan dari dalam sistem

Sebuah organisasi Rusia telah menunjukkan bahwa taktik persuasi dapat mempromosikan perubahan dari dalam. Dengan perkataan lain, Anda dapat menangkap lebih banyak lalat dengan madu dibanding dengan menggunakan cuka.

*Citizen's Watch* mengidentifikasi pejabat-pejabat Rusia demokratik yang cenderung mendukung HAM dan reformasi serta memberikan mereka kesempatan untuk memperkuat proses-proses demokratik di Rusia. Warisan pemerintah dan totalitarianisme Soviet meninggalkan kondisi-kondisi yang sangat menantang bagi pembangunan demokrasi di Rusia. Pejabat-pejabat pemerintah tidak punya pengalaman dalam bersikap responsif kepada publik, sebuah praktik yang penting dalam berdemokrasi.

*Citizen's Watch* secara berhati-hati memantau tindakan-tindakan dari pejabat-pejabat pemerintah terkemuka, termasuk individu-individu di Kementerian Dalam Negeri, kepolisian dan para hakim. Mereka kemudian mengidentifikasi pejabat-pejabat yang menunjukkan minat dalam pemerintahan yang lebih demokratik dan mendukung HAM—orang-orang yang juga mereka percaya akan terbuka pada perubahan—dan menyesuaikan pendekatan mereka agar bisa cocok dengan setiap individu, serta senantiasa memberikan apresiasi dan dukungan. Dalam beberapa kasus, taktik ini melibatkan penerjemahan dokumen-dokumen internasional pendukung demokrasi dan penghargaan kepada HAM yang juga amat berguna bagi kerja-kerja harian sang birokrat. Dalam hal lainnya, *Citizen's Watch* mengundang pejabat-pejabat dari luar negeri dalam sejumlah seminar atau mendukung perjalanan pejabat Rusia untuk dipertemukan dengan kolega mereka di negara lain. Selama pemerintahan Soviet, hanya sedikit saja pejabat yang memiliki kesempatan untuk melakukan perjalanan dan mempelajari kerja demokratik dari kolega-kolega mereka di luar negeri. Oleh karena itu *Citizen's Watch* menggunakan perjalanan dan kesempatan pertukaran baik untuk melatih pejabat pemerintahan maupun untuk memikat mereka untuk secara aktif mengupayakan perubahan.

Harapan kelompok itu adalah bahwa akses kepada dokumen internasional dan perjumpaan dengan kolega-kolega internasional ini akan membantu mengilustrasikan kemungkinan-kemungkinan, dan bahkan prestise, dalam kolaborasi antara pemerintah dan warga negara dan dalam kerja untuk menegakkan HAM. Ini juga

memberikan pejabat-pejabat pemerintahan informasi konkret serta contoh-contoh cara membenahi pemerintahan dan HAM di negara mereka sendiri.

Sebagai hasil dari upaya-upaya ini, *Citizen's Watch* telah membentuk sejumlah hubungan kerja sama dengan pejabat dan institusi pemerintah. Mendekati pejabat dalam sejumlah bidang, dan mendorong mereka dalam upaya mereka mereformasi departemen mereka, membantu memperkuat masyarakat sipil dan menciptakan hubungan yang lebih demokratis di antara badan-badan pemerintah dan komunitas.

Baca lebih jauh mengenai hal ini dalam buku catatan taktis yang tersedia di situs *web* <[www.newtactics.org](http://www.newtactics.org)>, di bawah *Tools for Action*.

*Citizen's Watch* mencoba mengingatkan para pejabat bahwa mereka pertama-tama adalah warga negara—dengan hak konstitusional yang harus dihormati—dan baru kemudian mereka menjadi pelayan dalam pemerintahan. Apa yang dapat kita pelajari dari *Citizen's Watch* adalah bahwa—bahkan dalam sistem pemerintahan yang tidak memiliki pengalaman terlibat dengan publik atau bekerja dalam demokrasi—ada celah untuk perubahan. Organisasi lain yang mengharapkan dapat mengambil keuntungan dari celah semacam ini di negara mereka, akan perlu untuk mengingat bahwa pendekatan ini menuntut suatu level ketrampilan yang tinggi dalam kerja-kerja diplomatis individual, bersama dengan persediaan sumber daya yang sungguh-sungguh mendalam. Ketrampilan dan sumber daya diplomatis ini adalah penting juga bagi aspek pokok lain dari taktik ini: menyediakan dukungan yang berkelanjutan bagi mereka yang sungguh menginginkan bantuan Anda untuk mengukuhkan penghargaan atas HAM.

Tradisi otoriter yang berat tidak mudah mati dan kadang mengalahkan kita sekali waktu, melemparkan kita beberapa langkah ke belakang. Sebagai contoh pada bulan Maret 2004, *Citizen's Watch*, bersama dengan sejumlah hakim dari beberapa daerah Rusia, mengorganisir sebuah konferensi dua hari untuk mendiskusikan problem membangun pengadilan di Rusia Barat Laut dan wilayah-wilayah lainnya. Kami mengundang beberapa hakim Mahkamah Agung yang—menurut pengetahuan kami—adalah yang paling aktif dalam proses ini, sebagaimana halnya administrator dari St. Petersburg dan pusat populasi lain di daerah tersebut.

*Dua minggu sebelum konferensi tersebut,  
kami diinformasikan bahwa pimpinan Mahkamah Agung  
telah melarang para hakim itu untuk berpartisipasi  
dalam konferensi kami*

*atau dalam event apa pun yang diorganisir oleh ornop.  
Namun para hakim lokal tersebut menunjukkan bahwa mereka pantas  
mendapatkan status independen yang menjadi mandat mereka di tahun 1992:  
dengan berbagai upaya akhirnya mereka muncul juga dalam konferensi tersebut  
—yang berlangsung di Pengadilan Kota St. Petersburg—  
untuk mendukung inisiatif tersebut.  
Para hakim yang datang cukup berani untuk secara publik  
membantah atasan mereka yang lebih tinggi.  
Ini membuktikan bahwa kami tidak bekerja sia-sia.*

*Boris Puslintsev*  
Citizen's Watch, Rusia

**Kekuatan Pemegang Saham:** Menghadirkan resolusi pemegang saham untuk menekan perusahaan agar mengadopsi praktik bisnis yang lebih bertanggungjawab secara sosial, termasuk kebijakan dan praktik HAM yang komprehensif

Para pemegang saham dan investor kerap kali tidak dianggap sebagai aktor potensial yang dapat memperbaiki perlindungan HAM dalam sektor bisnis.

*Interfaith Center on Corporate Responsibility—ICCR* (Pusat Antar Iman mengenai Tanggung Jawab Korporasi), sebuah koalisi yang terdiri dari 275 investor institusional berbasis iman/kepercayaan di Amerika Serikat, mempromosikan resolusi pemegang saham untuk mengubah kebijakan dan praktik perusahaan yang tidak adil atau berbahaya. Mulai dari tahun 2003, portofolio gabungan dari organisasi anggota ICCR yang ada pada saat itu diperkirakan mencapai sekitar 110 milyar dolar AS.

Anggota ICCR meneliti performa sosial dan lingkungan atas perusahaan tempat mereka berinvestasi. Alih-alih menjual saham dari perusahaan yang praktiknya berbahaya, ICCR menggunakan saham finansial mereka sebagai alat untuk menekan perusahaan agar mengubah praktik mereka.

Sebagai pemegang saham, anggota ICCR menempatkan resolusi mengenai isu sosial pada suara perusahaan yang akan dipilih pada pertemuan tahunan. Dalam satu contoh, sembilan institusi afiliasi ICCR mengco-*filed* resolusi pemegang saham dengan *Amalgamated Bank* dan beberapa institusi lain. Resolusi tersebut mendorong *Unocal* untuk mengadopsi kebijakan perusahaan baru berdasarkan pada Deklarasi

ILO—*International Labor Organization* (Organisasi Buruh Internasional) mengenai Prinsip dan Hak Fundamental dalam Pekerjaan dan diajukan kepada pemegang saham *Unocal* pada tahun 2002. Pemegang saham mengatakan bahwa citra *Unocal* terpuruk karena praktik-praktik etika bisnisnya dapat dipertanyakan (berkenaan dengan proyek pipa raksasa miliknya yang disalurkan ke Burma) dan bahwa hal ini dapat menghambat investasi di *Unocal*. Resolusi yang diajukan menerima suara yang tertinggi dalam catatan dalam dukungan kepada proposal pemegang saham hak manusia dan tenaga kerja dan mendapat perhatian dari dewan dan manajemen atas. Pada 2003, *Unocal* mengadopsi kebijakan berdasarkan pada deklarasi ILO. Pada tahun 2004, setelah para anggota ICCR mengajukan resolusi, *Occidental Petroleum* setuju untuk mengadopsi sebuah kebijakan HAM yang komprehensif. ICCR mempublikasikan sebuah *Proxy Resolution Book* tahunan yang berisikan resolusi pemegang saham yang diajukan tahun itu, sehingga manajer dapat membuat keputusan yang terdidik mengenai pemilihan suara yang diwakilkan (*proxy voting*) dan para investor dapat melihat sendiri kecenderungan yang berlaku dalam tanggung jawab perusahaan.

Setiap tahun institusi-institusi anggota ICCR mengajukan lebih dari 100 resolusi pemegang saham berkenaan dengan masalah sosial dan lingkungan hidup. Dalam banyak kasus, resolusi ini membuka pintu bagi negosiasi antara investor religius dan eksekutif perusahaan.

Sementara resolusi pemegang saham tidak terikat pada perusahaan, mereka sungguh-sungguh mendorong tindakan perusahaan ketika mereka menerima dukungan dari sejumlah pemegang saham utama. Dengan demikian ICCR telah berhasil membuat suaranya terdengar mengenai isu-isu penting semenjak tahun 1971. Dengan cara yang sama pentingnya, taktik ini memberi lebih banyak kesempatan untuk berpartisipasi dalam pemajuan HAM dengan mengubah cara mereka berinvestasi.

**Peradilan Semu (*Mock Tribunal*):** Mengorganisir Pengadilan Semu untuk membangkitkan kesadaran mengenai pelanggaran HAM dan mempengaruhi kebijakan publik

Kita tidak perlu menunggu sampai bentuk tertentu dari pelanggaran HAM berakhir, untuk mulai menggunakan tuturan dalam pemulihan dan rekonsiliasi serta memobilisasi opini publik.

*BAOBAB for Woman's Human Rights* bekerja sama dengan *Civil Resource Development and Documentation Centre*, mengorganisir Tribunal nasional pertama mengenai Kekerasan terhadap perempuan. Diadakan pada bulan Maret 2002 di Abuja, ibu kota Nigeria, tribunal ini sendiri memang tidak resmi dan tidak memiliki kekuatan hukum, akan tetapi kesaksian-kesaksian yang dihadapkannya adalah nyata. Tiga puluh tiga perempuan bersaksi, membagikan pengalaman mereka dalam upaya untuk membantu publik mengungkapkan kebenaran mengenai pelanggaran HAM yang telah diderita oleh para perempuan tersebut di rumah-rumah mereka, di komunitas, maupun di tangan pemerintah. Kesaksian mereka mencakup pelecehan seksual, kekerasan domestik, perkosaan dan mutilasi alat kelamin perempuan.

Panel Hakim dalam tribunal tersebut, yang kesemuanya adalah orang Nigeria, dipilih berdasarkan kepakaran dan kepedulian mereka pada problem hak asasi kaum perempuan. Mereka terdiri dari dua orang jaksa, seorang hakim Mahkamah Agung, seorang mantan duta besar, seorang anggota Komnas HAM Nigeria dan seorang lagi mantan Jaksa Agung. Tribunal ini tersebut terbuka bagi publik dan pihak organisator memberikan perhatian khusus untuk mengundang jurnalis, polisi, komisioner, legislator dan pengamat internasional. Tipe-tipe pelanggaran HAM yang berbeda dikelompokkan menjadi kelompok-kelompok yang berbeda pula. Panel hakim mendengarkan kesaksian dan mengajukan pertanyaan, kemudian bersidang sendiri. Setelah itu, alih-alih sekedar menjatuhkan hukuman, para hakim Tribunal membuat rekomendasi kebijakan publik.

Tribunal dan liputan media seputar kejadian itu menciptakan kesadaran publik yang lebih luas bahwasanya pelanggaran terhadap kaum perempuan sungguh-sungguh terjadi dan sungguh serius. Tribunal ini membantu memfasilitasi dikeluarkannya perundangan negara mengenai isu-isu berbeda yang mempengaruhi kaum perempuan dan mereka mengajukan Rancangan Undang-Undang baru mengenai kekerasan terhadap perempuan.

Baca lebih jauh mengenai hal ini dalam buku catatan taktis yang tersedia di <[www.newtactics.org](http://www.newtactics.org)>, di bawah *Tools for Action*.

Tribunal ini dapat membangkitkan kesadaran hanya ketika kesaksian-kesaksian tersebut menyebar ke hadapan publik luas, keberhasilan BAOBAB ini menuntut strategi media yang baik, bersama dengan kepemimpinan yang kuat dan penilaian yang tepat mengenai kebutuhan politis mereka. Sebagai contoh misalnya, BAOBAB memilih untuk tidak mengundang pakar internasional manapun untuk berperan sebagai hakim, sehingga pemerintah Nigeria tidak akan punya kesempatan untuk mengabaikan temuan-temuannya sebagai "urusan atau campur-tangan orang

luar” (“*outside meddling*”). Pihak-pihak lain yang ingin mengimplimentasikan taktik ini akan perlu juga untuk secara berhati-hati menyesuaikan susunan dan cakupan mandat dari tribunal mereka agar memiliki dampak yang paling kuat bagi target pemirsa yang mereka hendak capai. Tribunal semacam ini telah digunakan oleh berbagai komunitas di seluruh dunia untuk berbagai tujuan, dari mengenali pelanggaran HAM sampai pada membangkitkan kesadaran publik.

*Menemukan orang yang tepat untuk memberikan kesaksian adalah tantangan yang sangat besar, baik dalam proses pencarian maupun pendampingan dan pemberian motivasi.*

*Beberapa orang memiliki kepercayaan religius dan kultural yang mencegah mereka menuturkan kesaksian-kesaksian pedih mereka.*

*Beberapa lainnya mengekspresikan ketakutan, di mana mereka tidak ingin identitasnya disingkapkan. Ketakutan yang paling umum adalah*

*mengenai apa yang akan dipikirkan oleh komunitas mereka setelah mereka memberikan kesaksian di depan publik.*

*Mereka merasa takut ditolak oleh komunitas mereka.*

*Kami menanggapi hal ini dengan cara menyamarkan identitas mereka selama sesi pemberian kesaksian*

*Mufuliat Fijabi*

BAOBAB, Nigeria

## TAKTIK INSENTIF

**Taktik dalam kelompok ini memudahkan para orangtua, pemilik bisnis dan konsumen, sebagai contoh untuk memilih melakukan hal yang benar dengan cara menyediakan insentif bagi mereka.**

**Ketika orangtua merasa bahwa mereka mungkin butuh mengirimkan anak-anak mereka bekerja dalam upaya untuk bisa bertahan hidup, dukungan finansial dapat memberi mereka insentif untuk mengirimkan anak-anak mereka ke sekolah sebagai gantinya. Ketika kalangan bisnis tergoda oleh upah buruh yang rendah untuk menyewa anak-anak, mereka mungkin dapat diyakinkan untuk tidak melakukan hal tersebut ketika pinjaman mereka terikat pada praktik buruh atau ketika pasar yang menguntungkan**

**bagi barang-barang produksi yang manusiawi terbuka. Dan ketika kalangan bisnis berupaya membangun merek (brand) mereka, mereka mungkin menemukan insentif yang berpengaruh untuk mendukung hak asasi manusia dalam generasi konsumen yang bersuara vokal mengenai nilai-nilai mereka.**

**Taktik yang kami cakup di sini semua melibatkan insentif finansial, tetapi hal-hal lain dapat juga menjadi motivator yang berpengaruh—pengakuan, prestise dan keberadaan di tengah komunitas internasional, sebagai contoh, dapat memotivasi baik orang maupun pemerintah.**

**Dari Jalanan ke Sekolah:** Menyediakan dana bagi orangtua yang memungkinkan mereka untuk mengirim anak-anak mereka ke sekolah ketimbang bekerja

Kemiskinan merupakan salah satu penyebab akar dari pemakaian tenaga buruh anak. Banyak keluarga ingin mengirimkan anak-anak mereka ke sekolah, tetapi mereka tidak sanggup melakukannya karena mereka membutuhkan pendapatan yang dapat dikumpulkan oleh anak-anak itu. Sebuah program telah diciptakan di Brasil untuk memberikan dukungan ekonomi kepada keluarga-keluarga, dengan demikian memungkinkan kesempatan pendidikan bagi anak-anak mereka.

Program *Bolsa Escola* di Brasil memberikan gaji bulanan kepada keluarga-keluarga sehingga anak-anak mereka dapat mengikuti sekolah ketimbang bekerja di jalanan. Program itu, yang dimulai di kota Brasilia, diciptakan dengan kesadaran bahwa anak-anak yang bekerja pada hari ini akan menjadi orangtua miskin pada hari esok. *Bolsa Escola* diperluas menjadi program federal pada tahun 2001.

Program *Bolsa Escola* dikelola oleh Departemen Pendidikan. Keluarga-keluarga yang memenuhi syarat menerima pembayaran bulanan dan kartu ATM (kartu bank elektronik) yang memungkinkan mereka untuk mengakses gaji secara langsung. Keluarga-keluarga itu harus memenuhi kriteria berikut ini: anak-anak harus berusia antara 6 hingga 15 tahun dan tidak boleh bolos sekolah lebih dari dua hari setiap bulannya; setiap orang tua yang menganggur dalam keluarganya harus didaftarkan

kepada Sistem Penerimaan Kerja Nasional atau *National Employment System* (SINE) dan aktif mencari pekerjaan baru; dan keluarga yang bersangkutan harus sudah hidup di Brasil untuk sedikitnya lima tahun. Keluarga itu menerima gaji minimum selama dua tahun dan maksimum delapan tahun. Jika seorang anak tidak memenuhi tingkat kehadiran yang dimandatkan, gaji untuk bulan itu akan tidak diberikan.

Di samping memerangi kemiskinan dan mendorong anak-anak untuk menyelesaikan pendidikan mereka, taktik ini secara signifikan telah menurunkan jumlah tenaga buruh anak dan mengurangi jumlah anak yang *drop out* dari sekolah. Hingga saat ini *Bolsa Escola* telah membantu keluarga dari 8.289.930 anak. Ketika program federal diciptakan, *Bolsa Escola* menjadi program sosial paling luas di dunia.

Keluarga sering terlibat dalam penggunaan tenaga buruh anak—menjadi kebutuhan, alih-alih pilihan—dan taktik ini memberikan mereka alternatif. Memberikan kartu ATM yang terlihat mirip dan dapat digunakan seperti kartu ATM lainnya juga, membantu pihak penerima menghindari stigma yang dikaitkan dengan kemiskinan dan bantuan publik. Pendekatan ini jelas membutuhkan sumber daya finansial yang signifikan dan juga menuntut pengaturan administrasi dan koordinasi yang cukup kompleks di antara berbagai badan dan institusi.

*Insentif apa—di samping uang—  
yang akan memotivasi pihak lawan  
atau sekutu potensial Anda?*

**Mempertautkan Pinjaman dengan HAM:** Menawarkan pinjaman menarik kepada pemilik bisnis kecil, dengan syarat mereka tidak menggunakan tenaga buruh anak

Sebuah kelompok di Bangladesh memberi komunitas alternatif bagi penggunaan tenaga buruh anak, menyediakan pinjaman dengan persyaratan yang menarik bagi kalangan bisnis yang sepekat untuk tidak menyewa anak-anak.

*Bangladesh Rural Advancement Committee*—BRAC (Komite Kemajuan Desa Bangladesh) mengelola program Peminjaman dan Bantuan Perusahaan Mikro (*Micro Enterprise Lending and Assistance*—MELA), yang menawarkan pinjaman dengan persyaratan yang menarik bagi kalangan bisnis kecil yang secara normal tidak akan

dapat memperoleh dana, dengan syarat bahwa mereka tidak akan menggunakan tenaga buruh anak.

Program peminjaman menyediakan *kredit* bagi kalangan bisnis kecil baru atau sudah eksis—yang sanggup menunjukkan komitmen kewiraswataan—yang mencakup sektor-sektor tekstil, pemrosesan makanan, jasa dan transportasi. Peminjam cukup berminat atas skema pinjaman, yang merentang antara 300 hingga 3500 dolar AS dengan 15% biaya jasa. Ukuran pinjaman rata-rata adalah sekitar 1.000 dolar AS. Pihak peminjam sepakat dengan persyaratan ini karena bank umum di Bangladesh tidak akan mau meminjamkan kepada orang-orang desa, karena mereka menuntut pembayaran kembali dalam jumlah keseluruhan yang harus dibayarkan sekaligus, ketimbang dalam bentuk cicilan bulanan yang setara. Peminjam membayar pinjaman mereka dalam periode waktu satu hingga dua tahun.

BRAC juga memantau aktivitas para peminjam untuk memastikan bahwa mereka mematuhi persyaratan mereka dan staf lapangan disiapkan untuk mengambil tindakan langsung bila ditemukan pelanggaran HAM apa pun, tidak peduli apakah mereka melibatkan peminjam BRAC.

Sejak permulaannya di tahun 1996, program itu telah meminjamkan kepada lebih dari 45.000 peminjam di Bangladesh, kesemuanya adalah perusahaan yang tidak menggunakan tenaga buruh anak. Program itu secara simultan mebangkitkan tenaga kerja dengan cara menginjeksi kapital baru ke dalam bisnis lokal, menciptakan kesadaran mengenai problem tenaga buruh anak dan mengurangi penggunaan praktik-praktik tersebut.

Insentif di sini adalah jelas: BRAC telah mengidentifikasi sebuah kebutuhan dan memenuhinya, sambil menjelaskan secara rinci tuntutanannya untuk menghormati HAM. Taktik ini dapat juga digunakan dalam situasi lain di mana terdapat hubungan antara aktivitas finansial dan HAM, seperti dalam perlindungan terhadap diskriminasi, dalam penjaminan terhadap upah yang adil atau dalam penyediaan kondisi kerja yang aman. Pinjaman itu sendiri harus cukup menarik untuk menyediakan insentif, mungkin dengan memiliki tingkat bunga yang rendah atau syarat pembayaran kembali yang lebih baik dibanding yang disediakan oleh bank-bank umum.

## **Pemberian Label untuk Mengakhiri Penggunaan Tenaga Buruh Anak:** Menciptakan pasar untuk mendukung produk-produk yang diproduksi secara adil

Kadangkala konsumen, peminjam, pemegang saham dan pihak-pihak lainnya yang jauh dari pelanggaran itu sendiri—dari penggunaan tenaga buruh anak, dari praktik perburuhan yang tidak adil, dari degradasi lingkungan hidup di negara lain—memiliki insentif untuk mengubah perilaku mereka. Mungkin juga mereka merasa bahwa tidak memiliki alternatif atau kekurangan informasi yang dibutuhkan untuk membuat pilihan yang manusiawi dan adil. Sebuah yayasan menyediakan informasi dan alternatif yang dibutuhkan untuk membuat pilihan-pilihan mendukung HAM, bagi orang-orang yang jauh dari sumber daya maupun produk yang mereka beli.

Label *Rugmark*—dengan *icon* wajah tersenyum pada karpet—telah menjadi merek dagang cukup dikenal bagi inisiatif berkomitmen untuk mengidentifikasi dan mempromosikan karpet produksi tangan, tanpa menggunakan tenaga buruh anak. Yayasan *Rugmark* memberikan lisensi kepada eksportir karpet yang sepakat untuk tidak menggunakan tenaga kerja buruh anak dan yang secara sukarela mengajukan sistem *pemantauan* yang mencakup inspeksi mendadak dan cross-checking catatan ekspor dan mesin tenun. Anak-anak yang ditemukan bekerja secara ilegal selama inspeksi tersebut akan direhabilitasi dan disekolahkan oleh pihak *Rugmark*.

*Rugmark* menjalankan tiga langkah proses investigasi:

- Persetujuan lisensi setelah serangkaian inspeksi. Inspektur disewa dan dilatih oleh Yayasan *Rugmark*, serta langkah-langkah lainnya diambil untuk memastikan bahwa investigasi telah dilakukan dengan benar. Berikutnya pihak inspektur akan menyetujui pabrik itu, atau bila menemukan bukti penggunaan tenaga buruh anak, memberikan mereka waktu terbatas untuk segera menghentikan praktik ini.
- Inspeksi mendadak acak. Hanya karpet yang diproduksi setelah periode itu yang akan diberikan sertifikasi.
- Penelusuran karpet. Setiap karpet produk *Rugmark* dapat ditelusuri dengan melihat nama pembuat, lokasi dan eksportirnya.

*Rugmark* telah menghadapi berbagai tantangan dalam melaksanakan upayanya. Disebabkan karena lokasi mesin tenunnya yang terpencar-pencar secara luas di seluruh India, inspeksi reguler merupakan hal yang sulit. Struktur dari industri tidaklah seragam. Sementara beberapa eksportir terhubung secara erat dengan

mesin tenun, banyak perusahaan yang mempekerjakan pihak perantara, yang membuat sulit untuk memaksakan komponen penelusuran dari proses sertifikasi. Akan tetapi lebih dari 4.000 anak di India, Pakistan dan Nepal telah berhasil direhabilitasi melalui program *Rugmark* dan dari kampanye yang dimotori oleh *Rugmark*, ribuan anak lainnya telah dicegah untuk bekerja sebagai buruh di industri mesin tenun karpet secara keseluruhan.

Satu hal penting bagi keberhasilan *Rugmark* adalah adanya kesadaran bahwa terdapat tuntutan yang meningkat akan produk-produk yang dibuat tanpa menggunakan tenaga buruh anak. Karena *Rugmark* berurusan dengan importir karpet, tidak langsung dengan konsumen, ia harus meyakinkan importir bahwa ada pasar bagi karpet-karpet ini. Di samping biaya karpetnya sendiri, para importir karpet-karpet *Rugmark* membayar 1,75% royalti untuk biaya tahunan total dari impor, sebuah porsi yang dialokasikan ke dalam program rehabilitasi dan pendidikan anak. Sebagai imbalannya, *Rugmark* mempromosikan pedagang eceran untuk menjual karpet-karpet mereka. Pedagang-pedagang eceran ini disebutkan dalam kampanye *Rugmark* dan dalam peristiwa-peristiwa di mana *Rugmark* memainkan peranan, seperti pada Hari Menentang Eksploitasi Tenaga Buruh Anak Sedunia (*World Day against Child Labor*). Para pedagang eceran juga diberikan bahan-bahan promosi yang menjelaskan pentingnya membeli karpet *Rugmark*. *Rugmark* memberitahukan pihak importir dan pedagang eceran yang membawa karpet sertifikasi tersebut, bahwa mereka tidak hanya membantu meraih konsumen yang menginginkan karpet yang bebas tenaga buruh anak, tetapi juga meningkatkan citra publik mengenai barang dagangan mereka.

Label *Rugmark*, seperti banyak sistem pelabelan lainnya yang diciptakan kira-kira dalam dekade yang lalu, memberikan konsumen informasi yang mereka butuhkan untuk terhindar dari kontribusi atas pelanggaran HAM. Pada saat yang sama, ia meningkatkan kesadaran mengenai problem yang berkaitan dengan produk tertentu, serta menciptakan permintaan pasar akan produk-produk yang diproduksi dan dimasukkan ke dalam pasar secara manusiawi. Karena produsen menginginkan akses kepada pasar tersebut, mereka memiliki insentif untuk berpartisipasi.

Program semacam itu memiliki resiko dilusi mengenai arti dari "merek", jika tidak dikaitkan dengan proses *pemantauan* ketat yang sesuai, yang cukup rumit dan intensif dari segi sumber daya. Ini mungkin juga perlu digunakan dalam gabungan dengan taktik penumbuhan kesadaran lainnya dalam upaya menginformasikan kepada konsumen dan produsen serta meyakinkan mereka bahwa ada alasan signifikan untuk peduli dengan perubahan dalam proses produksi.

**Ketika Bisnis Memimpin Jalan:** Mengonsentrasikan semua rantai produksi di dalam fasilitas yang memudahkan *pemantauan* dan penghapusan tenaga buruh anak

*Reebok* adalah salah satu merek dagang yang paling terkenal dalam bisnis, sebuah merek dagang yang telah diproteksi sebagian dalam upaya perusahaan untuk melindungi hak asasi manusia melalui *pemantauan*.

Pada tahun 1996 *Reebok International* memulai program *pemantauan* pabrik, pelabelan produk dan program pendidikan untuk mencegah penggunaan tenaga buruh anak di pabrik bola sepak buatan tangan mereka di Pakistan.

Sekitar 20% tenaga buruh di fasilitas produksi bola sepak di Sialkot, Pakistan, adalah anak-anak. Standar HAM *Reebok* menuntut bahwa pekerja di pabriknya harus berumur minimal 15 tahun, atau lebih tua dari itu, tergantung kepada hukum setempat yang berlaku.

Ketika ia memasuki pasar bola sepak, *Reebok* bertindak untuk mencegah penggunaan tenaga buruh anak dengan menampung semua produksi, termasuk menjahit, dalam fasilitas pabrik yang canggih yang tersentral di Sialkot. Semua pekerjaan dilaksanakan di tempat itu dan bebas dari tenaga buruh anak. Pengawas menginspeksi fasilitas produksi secara periodik, mewawancarai pekerja dan mengawasi inspektur yang mengawasi pengapalan panel-panel yang keluar-masuk pabrik. Mereka juga menjaga ikatan dengan komunitas lokal dan mengunjungi lingkungan pedesaan untuk mengonfirmasikan bahwa tidak ada bola *Reebok* yang dijahit di luar pabrik. Bola sepak itu kemudian dibubuhi label “Dijamin: dibuat tanpa menggunakan tenaga buruh anak”. Ini memberikan konsumen pilihan berkenana dengan bagaimana bola sepak mereka diproduksi dan membangun kesadaran mengenai tenaga buruh anak dalam industri bola sepak.

Sebagai hasil dari mengonsentrasikan produksi dalam fasilitas yang bebas dari tenaga buruh anak, *Reebok* telah dapat memproduksi puluhan ribu bola sepak tanpa menggunakan tenaga buruh anak.

Pada tahun 1997, *Reebok* menciptakan program *Reebok Educational Assistance to Pakistan—R.E.A.P.* (Bantuan Pendidikan *Reebok* untuk Pakistan) dan mengalokasikan 1 juta dolar AS dari penjualan produk bola ini untuk mendukung pendidikan di daerah tempat bola-bola itu diproduksi. Pada tahun 1997 *Reebok* bergabung dengan *Society for Advancement of Education* (Masyarakat untuk Pemajuan Pendidikan) di Sialkot untuk mendirikan Chanaan Institute, yang bekerja

sama dengan keluarga-keluarga setempat untuk menempatkan anak-anak di sekolah dan menjauhkan mereka dari kubangan buruh anak.

Di sini *Reebok* melihat pasar bagi produk-produk tanpa menggunakan tenaga buruh anak dan memutuskan untuk mengisinya. Beberapa tahun ini kesadaran publik telah berkembang di seputar isu ini. Sebagai sebuah perusahaan multinasional dengan pemasaran yang kuat, *Reebok* berada dalam posisi yang unik untuk mempengaruhi seluruh rantai produksi dan distribusi bagi produk-produknya. Faktor itu merupakan aspek yang penting dari taktik yang satu ini; rantai produksi yang panjang dari bahan mentah sampai pada konsumen dalam perekonomian global, memang mempersulit *pemantauan* pelanggaran HAM. Namun *Reebok* menyadari kebutuhannya untuk mengonsolidasikan langkah-langkah itu dalam upaya untuk memastikan bahwa produk-produknya dibuat tanpa menggunakan tenaga buruh anak.

Taktik pelabelan ini dapat digunakan untuk memenuhi tuntutan pasar akan produk-produk "*fair labor*" ("hasil tenaga kerja yang adil") lainnya: memproduksi barang-barang sedemikian rupa sehingga para pemasok bahan mentahnya dibayar dengan harga yang adil; barang-barang dibuat di pabrik-pabrik di mana para buruhnya juga dibayar dengan upah yang adil; serta produk-produk yang dibuat atau ditanam dengan cara yang ramah lingkungan.

*Adakah kalangan bisnis  
yang dapat menjadi sekutu tak terduga  
dalam perjuangan Anda?*